
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2019-2024



**DINAS PERTANIAN
KABUPATEN CIREBON**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 93 TAHUN 2021

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, perlu mengubah rencana strategis perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7);
26. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 50), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi :

1. Lampiran I : Renstra Sekretariat Daerah
2. Lampiran II : Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Lampiran III : Renstra Inspektorat
4. Lampiran IV : Renstra Dinas Pendidikan
5. Lampiran V : Renstra Dinas Kesehatan
6. Lampiran VI : Renstra Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7. Lampiran VII : Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8. Lampiran VIII : Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9. Lampiran IX : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
10. Lampiran X : Renstra Dinas Sosial
11. Lampiran XI : Renstra Dinas Ketenagakerjaan
12. Lampiran XII : Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13. Lampiran XIII : Renstra Dinas Lingkungan Hidup
14. Lampiran XIV : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Lampiran XV : Renstra Dinas Perhubungan
16. Lampiran XVI : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
17. Lampiran XVII : Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
18. Lampiran XVIII : Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga
19. Lampiran XIX : Renstra Dinas Pertanian
20. Lampiran XX : Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
21. Lampiran XXI : Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian
22. Lampiran XXII : Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
23. Lampiran XXIII : Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

24. Lampiran XXIV : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25. Lampiran XXV : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26. Lampiran XXVI : Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27. Lampiran XXVII : Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
28. Lampiran XXVIII : Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah
29. Lampiran XXIX : Renstra Badan Pendapatan Daerah
30. Lampiran XXX : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
31. Lampiran XXXI : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
32. Lampiran XXXII : Renstra Kecamatan Arjawinangun
33. Lampiran XXXIII : Renstra Kecamatan Astanajapura
34. Lampiran XXXIV : Renstra Kecamatan Babakan
35. Lampiran XXXV : Renstra Kecamatan Beber
36. Lampiran XXXVI : Renstra Kecamatan Ciledug
37. Lampiran XXXVII : Renstra Kecamatan Ciwaringin
38. Lampiran XXXVIII : Renstra Kecamatan Depok
39. Lampiran XXXIX : Renstra Kecamatan Dukupuntang
40. Lampiran XL : Renstra Kecamatan Gebang
41. Lampiran XLI : Renstra Kecamatan Gegecik
42. Lampiran XLII : Renstra Kecamatan Gempol
43. Lampiran XLIII : Renstra Kecamatan Greged
44. Lampiran XLIV : Renstra Kecamatan Gunungjati
45. Lampiran XLV : Renstra Kecamatan Jamblang
46. Lampiran XLVI : Renstra Kecamatan Kaliwedi
47. Lampiran XLVII : Renstra Kecamatan Kapetakan
48. Lampiran XLVIII : Renstra Kecamatan Karangsembung
49. Lampiran XLIX : Renstra Kecamatan Karangwareng
50. Lampiran L : Renstra Kecamatan Kedawung
51. Lampiran LI : Renstra Kecamatan Klangeran
52. Lampiran LII : Renstra Kecamatan Lemahabang
53. Lampiran LIII : Renstra Kecamatan Losari
54. Lampiran LIV : Renstra Kecamatan Mundu
55. Lampiran LV : Renstra Kecamatan Pabedilan
56. Lampiran LVI : Renstra Kecamatan Pabuaran
57. Lampiran LVII : Renstra Kecamatan Palimanan
58. Lampiran LVIII : Renstra Kecamatan Pangenan
59. Lampiran LIX : Renstra Kecamatan Panguragan
60. Lampiran LX : Renstra Kecamatan Pasaleman

- 61. Lampiran LXI : Renstra Kecamatan Plered
- 62. Lampiran LXII : Renstra Kecamatan Plumbon
- 63. Lampiran LXIII : Renstra Kecamatan Sedong
- 64. Lampiran LXIV : Renstra Kecamatan Sumber
- 65. Lampiran LXV : Renstra Kecamatan Suranenggala
- 66. Lampiran LXVI : Renstra Kecamatan Susukan
- 67. Lampiran LXVII : Renstra Kecamatan Susukanlebak
- 68. Lampiran LXVIII : Renstra Kecamatan Talun
- 69. Lampiran LXIX : Renstra Kecamatan Tengahtani
- 70. Lampiran LXX : Renstra Kecamatan Waled
- 71. Lampiran LXXI : Renstra Kecamatan Weru

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
 - a. Program dan/atau kegiatan dan/atau sub kegiatan Pembangunan Daerah;
 - b. Program Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
 - c. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;
 - d. Target dan Capaian Indikator Kinerja Program dan/atau Kegiatan dan/atau sub kegiatan Pembangunan Daerah;
 - e. Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - f. Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK); dan
 - g. Target dan Capaian Indikator *Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renstra yang diterjemahkan dalam Renja Perangkat Daerah dan RKPD serta didukung aplikasi khusus.

3. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 2 (dua) ayat baru, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kebijakan, Program, dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 tetap dilaksanakan dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014-2019.
- (2) Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 merupakan hasil pemetaan yang dituangkan dalam berita acara yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang

mengatur Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- (3) Penyesuaian Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan
paling lambat pada Bulan Oktober 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan pencmpatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 September 2021

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 050.3/Kep. 828 -Distan/2021

LAMPIRAN : 2 (Dua) Lembar

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 karena adanya perubahan yang mendasar dan perubahan kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Cirebon termasuk perubahan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, maka perlu mengubah rencana strategis Dinas Pertanian Tahun 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat daerah menyusun Rencana strategis yang berpedoman kepada RPJMD yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20, Seri D);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20, Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terkait:
 - 1) data sumber daya manusia pada Dinas Pertanian baik PNS, PPPK maupun non ASN.
 - 2) data laporan keuangan tahunan Dinas selama 5 (lima) tahun terakhir termasuk data aset atau barang modal yang dimiliki.
 - 3) data capaian kinerja pelayanan perangkat daerah terutama realisasi capaian indikator

Standar Pelayanan Minimal, data realisasi indikator SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, data realisasi indikator kinerja kunci urusan pemerintahan lima tahun terakhir.

- 4) data dokumen Renstra Kementerian/ lembaga yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, data dokumen Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, data dokumen Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, dokumen RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038, data hasil KLHS, rancangan akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.
- b. menginventarisir, mempelajari dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait perencanaan pembangunan, penganggaran daerah dan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya;
- c. mempelajari dan mengimplementasikan panduan atau petunjuk teknis terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah;
- d. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian ;
- e. menyusun Rancangan awal Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2019-2024;
- f. melaksanakan Forum Organisasi Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian ;
- g. menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2019-2024;
- h. menyampaikan rancangan akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2019-2024 kepada Kepala Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi;
- i. memperbaiki dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi dari Bappelitbangda untuk penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2019-2024; dan
- j. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

BUPATI CIREBON,



I M R O N

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 051.2/Kep.828-Distan/2021

TANGGAL : 31 Desember 2021

TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON TAHUN
2019-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian
- Ketua Tim : Sekretaris Dinas Pertanian
- Sekretaris Tim : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Kelompok Kerja : a. Sekretariat
1. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
 2. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset
 3. Wisnu Ardhi
 4. Saudi
- b. Bidang Sarana Prasarana
1. Kepala Bidang Sarana Prasarana
 2. Kepala Seksi Lahan Dan Irigasi
 3. Kepala Seksi Pupuk Dan Pestisida
 4. Kepala Seksi Alat Mesin Pertanian
 5. Guruh Widyo, S.T
- c. Bidang Tanaman Pangan
1. Kepala Bidang Tanaman Pangan
 2. Kepala Seksi Perbenihan Dan Produksi
 3. Kepala Seksi Perlindungan, Pengolahan Dan Pemasaran
 4. Wahyu Purnama, S.Kom
- d. Bidang Hortikultura dan Kebun
1. Kepala Bidang Hortikultura
 2. Kepala Seksi Hortikultura
 3. Kepala Seksi Perkebunan
 4. Januar, S.E
- e. Bidang Peternakan Kesehatan Hewan
1. Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan
 2. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Pengembangan Peternakan
 3. Kepala Seksi Penanggulangan Penyakit Dan Pengawasan Obat Hewan
 4. Kepala Seksi Produksi Peternakan Pada Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
 5. Lastriana Waldi, S.Pt., M.P

f. Bidang Penyuluhan

1. Kepala Bidang Penyuluhan

2. Kepala Seksi Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia

3. Kepala Seksi Metode Dan Informasi

4. R. Bayu Aria Wicaksana, S.P.

BUPATI CIREBON,



IMRON

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, dalam uraian lebih lanjut ditulis sebagai RENSTRA Dinas Pertanian, periode 2019-2024 merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon. Evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 pada tahun 2020 menyebabkan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon mengambil kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD. Seiring dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, maka pada tahun 2020 mulai dilakukan proses evaluasi terhadap RENSTRA Dinas Pertanian untuk kebutuhan Perubahan RENSTRA Dinas Pertanian Tahun 2019-2024.

Perubahan RENSTRA memuat penyesuaian kondisi terhadap RENSTRA mencakup perencanaan makro bidang pertanian yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kesehatan Hewan, dan fungsi Penyuluhan. Perubahan RENSTRA Dinas Pertanian merupakan acuan rencana dan kegiatan lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon serta dapat dijadikan bahan rujukan bagi instansi terkait lintas sektoral pemerintah Kabupaten Cirebon dan para pihak pemerhati pembangunan pertanian.

Tersusunnya Renstra ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peranan semua komponen yang ada di Dinas Pertanian serta seluruh *stake holders*. Untuk itu kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya Perubahan RENSTRA ini kami mengucapkan terima kasih.

Sumber, Juli 2021
Plt. Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Cirebon



Drs. H. ASDULLAH, M.M.

NIP. 19640203 199009 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-7
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN.....	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	II-1
2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.....	II-14
2.3. Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon 2020.....	II-18
2.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Perangkat Daerah.....	II-26
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon 2019-2024.....	II-32
BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON.....	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.....	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-2
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Renstra Provinsi.....	III-5
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-8
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	III-10
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-1
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-1
5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon	V-1
5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Pertanian.....	V-3
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-1
6.1. Rencana Program dan Kegiatan.....	VI-1
6.2. Rencana Pendanaan Indikatif.....	VI-11
BAB 7 INDIKATOR KINERJA SKPD.....	VII-1
7.1 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.....	VII-1
7.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.....	VII-4
BAB 8 PENUTUP.....	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.	Rekapitulasi PNS Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Berdasarkan Golongan Tahun 2020.....	II-15
Tabel	2.2.	Rekapitulasi PNS Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2017-2020.....	II-15
Tabel	2.3.	Data Asset Dinas Pertanian Kab. Cirebon Tahun 2017-2020.....	II-16
Tabel	2.4.	Kelembagaan Petani di Kabupaten Cirebon Tahun 2020.....	II-16
Tabel	2.5.	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Tahun 2020.....	II-17
Tabel	2.6.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.....	II-20
Tabel	2.7.	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.....	II-22
Tabel	2.8.	Pencapaian Target dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Dinas Pertanian 2015-2020.....	II-28
Tabel	2.9.1	Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2015-2020.....	II-30
Tabel	2.9.2	Pencapaian Target dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Dinas Pertanian 2015-2020.....	II-31
Tabel	3.1.	Telaah Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.....	III-6
Tabel	3.2.	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi.....	III-7
Tabel	3.3.	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi.....	III-7
Tabel	3.4.	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi.....	III-7
Tabel	3.5.	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	III-9
Tabel	3.6.	Telaahan Sasaran Renstra K/L, Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.....	III-11
Tabel	4.1.	Target Produksi Komoditas Unggulan Pertanian Tahun 2020-2024 (Ton)	IV-4
Tabel	4.2	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.....	IV-5
Tabel	4.3	Keterkaitan RPJMD dengan Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.....	IV-6
Tabel	5.1.	Analisis Terhadap Peluang dan Tantangan Kinerja Dinas Pertanian.....	V-2
Tabel	5.2.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	V-5
Tabel	6.1.	Indikator Program pada Perubahan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.....	VI-5
Tabel	6.2.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.....	VI-6

Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.....	VII-3
Tabel 7.2.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.....	VII-4
Tabel 7.3.	Target Produksi Beras Tahun 2020-2024.....	VII-5
Tabel 7.4.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Pertanian Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.....	VII-6

DAFTAR GRAFIK

Grafik	2.1.	Indikator Kinerja Kunci Tahun 2020.....	II-18
Grafik	2.2.	Target dan Realisasi Produksi Komoditas Unggulan Tahun 2021.....	II-21

Lampiran XIX : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon
Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN TAHUN 2019-2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Cirebon dilaksanakan melalui pendekatan *top-down policy* (sejalan dengan arah kebijakan pembangunan pertanian nasional) dan *bottom-up planning* (sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya petani). Pembangunan pertanian Kabupaten Cirebon jangka menengah secara teknis tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Pertanian periode 2019-2024 disusun untuk menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2019-2024 yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024.

Dalam melaksanakan pembangunan perlu tatakelola pemerintahan (*collaborative governance*) yang baik dalam perspektif hubungan pusat-daerah sebagai landasan strategi pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya yang ada untuk mendukung pencapaian tujuan yang searah. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam upaya menyusun Renstra, Dinas Pertanian melakukan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan lainnya diantaranya dokumen Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia serta Renstra beberapa perangkat daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Pada tahun 2020 dilakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang menyebabkan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon mengambil kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD. Seiring dengan adanya

perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, maka pada tahun 2020 mulai dilakukan proses evaluasi terhadap Rencana Strategis Dinas Pertanian untuk kebutuhan perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2019-2024.

Perubahan RPJMD dilakukan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat (5) yang menyatakan bahwa RPJPD, RPJMD dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi ditemukan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 adalah adanya perubahan kebijakan nasional.

Kebijakan nasional dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, di antaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD); dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, hal lain yang mendasari perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 adalah terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Pada tanggal 30 Januari 2020, World Health Organization (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD).

Berkaitan dengan hal tersebut perangkat daerah perlu melakukan penyesuaian rencana strategis. Pada tingkat perangkat daerah hal penting

yang menjadi latar belakangnya perubahan rencana strategis (renstra) adalah:

1. Adanya kebijakan nasional berkaitan dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah yang tertuang dalam RPJMD harus merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah harus terinput dalam sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
3. Kejadian wabah pandemi COVID-19, sebagai bencana nasional, menyebabkan lambatnya pertumbuhan perekonomian di daerah. Menyikapi hal tersebut maka Dinas Pertanian menyiapkan program/kegiatan yang dapat mendukung peningkatan produksi hasil pertanian dengan harapan agar sektor pertanian dapat tetap tumbuh.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14 Seri E.8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7 Seri E.5);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan yang Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 50 Seri E);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20 Seri D);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 39 Seri D).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian tahun 2019-2024 adalah :

- a. Untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- b. Sebagai dokumen perencanaan bagi perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2019-2024 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan ditetapkannya Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat daerah adalah :

1. Memberikan pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD.

2. Memberi arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Bupati.
3. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 terdiri dari 7 (tujuh) Bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KABUPATEN CIREBON

Mengemukakan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon; Sumberdaya Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon; Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Mengemukakan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon; Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaahan Renstra Kelembagaan/Lembaga dan Renstra Kabupaten; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah;

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Mengemukakan sinergitas Visi dan Misi Kepala daerah Kabupaten Cirebon dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengemukakan penjabaran Tujuan dan Sasaran yang dilakukan melalui Strategi dan Arah Kebijakan

Dinas Pertanian periode 2019-2024;

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Mengemukakan penjabaran strategi dan arah kebijakan yang dilakukan melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pertanian periode 2019-2024;

BAB VII. INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2019-2024

Mengemukakan penjabaran tolak ukur penilaian yang dilakukan terhadap Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pertanian periode 2019-2024 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2019-2024;

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pertanian menjadi salah satu perangkat daerah di Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon. Sementara menurut Peraturan Bupati Cirebon Nomor 80 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pertanian disebutkan bahwa Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas: *menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Penyuluhan berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan*”

Dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Pertanian dinyatakan bahwa dalam menyelenggarakan tugas tersebut maka Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

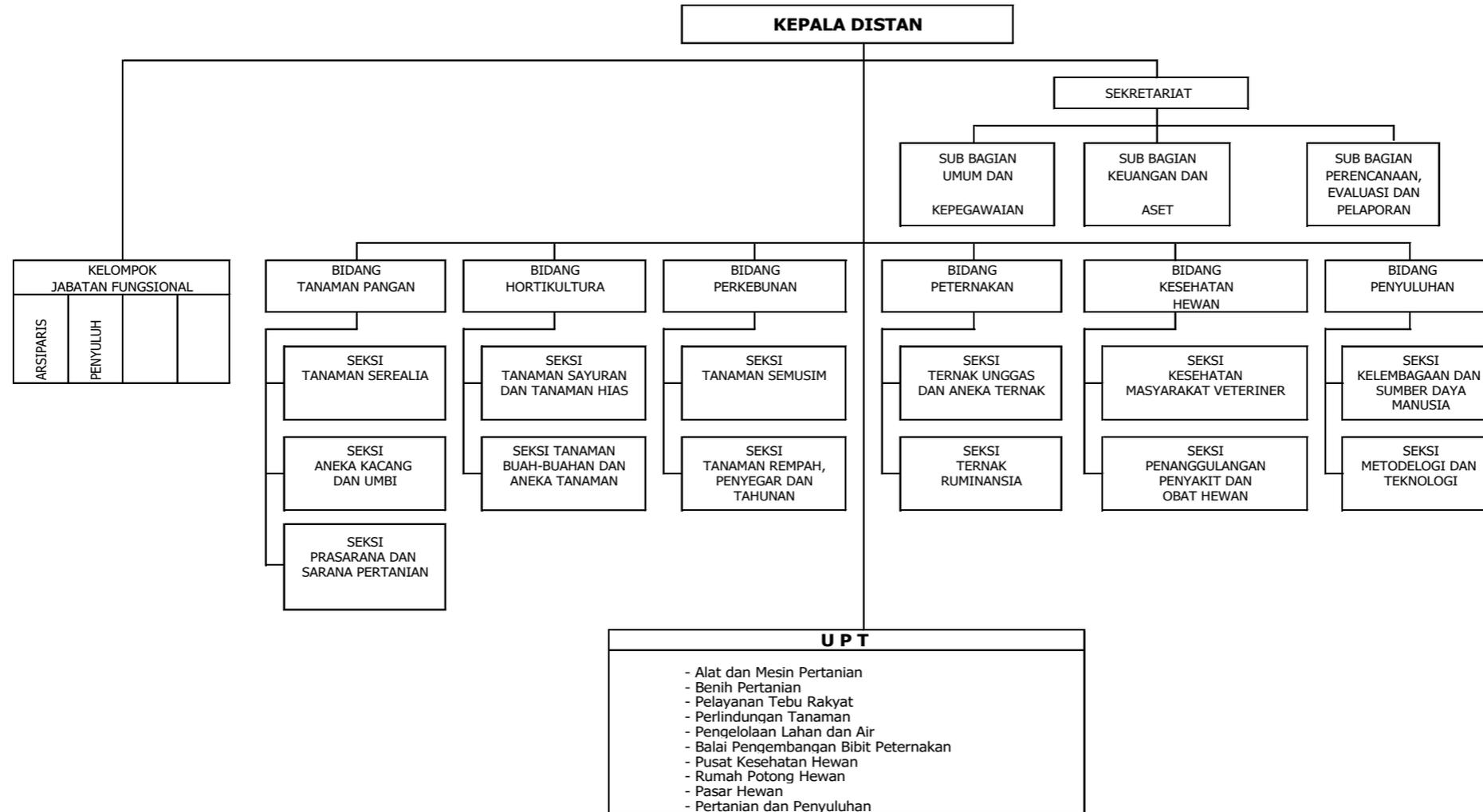
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan Penyuluhan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan penyuluhan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan penyuluhan;
4. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan Dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 6 (enam) Kepala Bidang dengan 3 (tiga) Kepala Subbagian dan 13 (tiga belas) Kepala Seksi dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- A. Kepala Dinas,
- B. Sekretaris
 1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
 2. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset,
 3. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

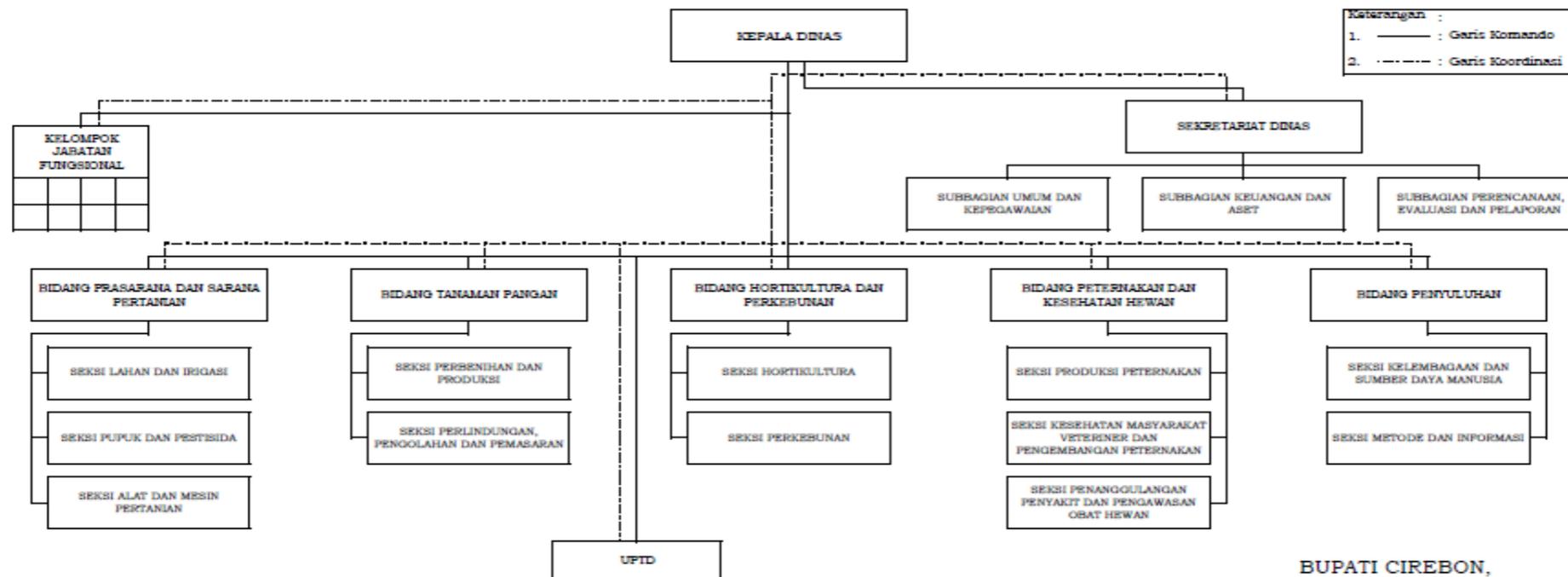
- C. Kepala Bidang Tanaman Pangan
 - 1. Seksi Tanaman Serealia
 - 2. Seksi Aneka Kacang dan Umbi
 - 3. Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian,
- D. Kepala Bidang Hortikultura
 - 1. Seksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Hias,
 - 2. Seksi Buah-buahan dan Aneka Tanaman,
 - 3. Kepala Bidang Perkebunan,
 - 1. Seksi Tanaman Semusim,
 - 2. Seksi Tanaman Rempah, Penyegar dan Tahunan,
- E. Kepala Bidang Peternakan,
 - 1. Seksi Ternak Unggas dan Aneka Ternak,
 - 2. Seksi Ternak Ruminansia,
- F. Kepala Bidang Kesehatan Hewan,
 - 1. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner,
 - 2. Seksi Penanggulangan Penyakit dan Obat Hewan,
- G. Kepala Bidang Penyuluhan,
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia,
 - 2. Seksi Metodologi dan Teknologi.
- H. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- I. Koordinator Balai Penyuluh Pertanian;
- J. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN 2.1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON**

Lampiran XIX : Peraturan Bupati Cirebon
 Nomor : 20 Tahun 2021
 Tanggal : 12 April 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon



Diundangkan di Sumber
 pada tanggal 12 April 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

RAHMAT SUTRISNO
 BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 20, SERI D

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Activate V
 Go to Setting

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah digantikan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon yang berlaku mulai tanggal 12 April 2021.

Dinas Pertanian menurut Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) Kepala Bidang dengan 3 (tiga) Kepala Subbagian dan 12 (dua belas) Kepala Seksi, susunan organisasi Dinas Pertanian terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat Dinas, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset;
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri atas :
 1. Seksi Lahan dan Irigasi;
 2. Seksi Pupuk dan Pestisida;
 3. Seksi Alat dan Mesin Pertanian.
- d. Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas :
 1. Seksi Perbenihan dan Produksi;
 2. Seksi Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran.
- e. Bidang Hortikultura dan Perkebunan, terdiri atas :
 1. Seksi Hortikultura;
 2. Seksi Perkebunan.
- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas :
 1. Seksi Produksi Peternakan;
 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengembangan Peternakan;
 3. Seksi Penanggulangan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan.
- g. Bidang Penyuluhan, terdiri atas :
 1. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;

2. Seksi Metode dan Informasi.

- h. UPTD;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Menurut Peraturan Bupati nomor 20 tahun 2021 Pasal 58 ayat (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang pertanian;
- b. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
- c. pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- e. pembinaan dan pengawasan perizinan usaha pertanian;
- f. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian;
- h. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 39 Tahun 2021 mengatur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, selengkapnya seperti disajikan berikut.

1. KEPALA DINAS

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan perencanaan pada Dinas Pertanian;

- b. perumusan kebijakan bidang pertanian;
- c. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
- d. pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- f. pembinaan dan pengawasan perizinan usahapertanian;
- g. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- h. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT DINAS

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat Dinas mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanian.
- (3) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Dinas;
 - b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanian;
 - c. pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumah tanggaan;
 - d. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - e. pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
 - f. pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;

- g. pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah;
- h. perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- i. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- j. pengoordinasian penyusunan penataan organisasi dan tata laksana;
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan pengelolaan prasarana dan sarana pertanian.
- (3) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana pertanian;
 - c. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - e. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;

- f. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- g. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Tanaman Pangan

- (1) Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan tanaman pangan.
- (3) Bidang Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Tanaman Pangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan;
 - c. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih tanaman pangan;
 - d. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman pangan;
 - e. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi tanaman pangan;
 - f. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim tanaman pangan;
 - g. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
 - h. pemberian izin usaha/ rekomendasi teknis dibidang tanaman

pangan;

- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Tanaman Pangan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Hortikultura dan Perkebunan

- 1) Bidang Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- 2) Bidang Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan hortikultura dan perkebunan yang meliputi produksi tanaman hortikultura, produksi tanaman perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura dan perkebunan.
- 3) Bidang Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang hortikultura dan perkebunan;
 - c. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hortikultura dan perkebunan;
 - d. pengoordinasian dalam merencanakan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura dan perkebunan;
 - e. pengoordinasian dalam merencanakan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang hortikultura dan perkebunan;
 - f. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura dan perkebunan;
 - g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura dan perkebunan;

- h pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura dan perkebunan;
- i. pemberian izin usaha rekomendasi teknis dibidang hortikultura dan perkebunan;
- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Hortikultura dan Perkebunan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan peternakan dan kesehatan hewan yang meliputi produksi peternakan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengembangan peternakan serta penanggulangan penyakit dan pengawasan obat hewan.
- (3) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - d. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - e. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - f. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
 - g. pengawasan obat hewan;
 - h. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;

- i. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
- j. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- k. fasilitasi pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- l. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Penyuluhan

- (1) Bidang Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang Penyuluhan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Penyuluhan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan penyuluhan yang meliputi kelembagaan dan sumber daya manusia serta metode dan informasi pertanian.
- (3) Bidang Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Penyuluhan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian;
 - c. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
 - d. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
 - f. pemberian fasilitas penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

- g. peningkatan kapasitas penyuluh pertanian baik dari Aparatur Sipil Negara, swadaya maupun swasta;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Penyuluhan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pembentukan, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas menunjang tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada poin (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada poin (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada poin (3), ditentukan berdasarkan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon sampai akhir tahun 2020 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 205 (dua ratus lima) orang Pegawai Negeri Sipil (120 laki-laki dan 60 perempuan) dan 97 orang pegawai kontrak (data per 31 Desember 2020). Latar belakang pendidikan PNS bervariasi mulai Sekolah Dasar (SD) hingga Strata dua (S2) dan latar belakang pendidikan untuk pegawai kontrak kerja adalah Sekolah Dasar (SD) hingga Strata Satu (S1). Rekapitulasi pegawai (PNS) berdasarkan golongan pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Rekapitulasi PNS Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2020 Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah Pegawai (Orang)	
		2019	2020
1	I/a	0	0
2	I/b	0	0
3	I/c	4	2
4	I/d	0	2
Jumlah PNS Gol I:		4	4
1	II/a	19	29
2	II/b	0	0
3	II/c	10	17
4	II/d	5	8
Jumlah PNS Gol II:		34	54
1	III/a	21	33
2	III/b	14	15
3	III/c	27	20
4	III/d	40	41
Jumlah PNS Gol III:		102	109
1	IV/a	23	19
2	IV/b	11	15
3	IV/c	4	4
4	IV/d	0	0
Jumlah PNS Gol IV:		38	38
Jumlah Total:		178	205

Tabel 2.2. Rekapitulasi PNS Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)
1	S3	1
2	S2	19
3	S1	107
4	D4	2
5	D3	24
6	D1	-
7	SMA/SLTA	46
8	SMP/SLTP	1
9	SD	5
Jumlah:		205

Untuk mendukung pencapaian tujuan yang tertuang pada Renstra Dinas Pertanian tahun 2019-2024 kinerja Dinas Pertanian sampai tahun 2024 maka diperlukan penambahan sumber daya manusia khususnya untuk beberapa jabatan fungsional. Selengkapnya seperti pada Tabel 2.4.

Tabel 2.3. Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Dinas Pertanian Sampai Tahun 2024

No	Nama Jabatan Fungsional	Kondisi Pegawai Saat Ini		Kebutuhan	
		PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	Analisis pasar hasil pertanian	3	0	0	3
2	Pengawas benih tanaman	1	0	3	4
3	Pengawas mutu pakan	2	0	5	3
4	Pengawas bibit ternak	2	0	5	3
5	Penyuluh Pertanian	82	104	144	156
6	Paramedik Veteriner	13	0	22	7
7	Pengawas pupuk dan pestisida	1	0	1	2
8	Analisis alat dan mesin pertanian	1	0	1	0
9	POPT	3	0	3	22
10	Pengelola teknologi perbenihan	1	0	1	4
11	Medik Veteriner	8	0	8	4
12	Analisis sarana dan prasarana pertanian	0	0	2	7
13	Pengawas alat dan mesin pertanian	0	0	2	2
14	Pengawas mutu hasil pertanian	0	0	3	5
Jumlah:		117	104	200	222

2.2.2. Asset / Modal Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon

Dalam upaya mendukung tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon perlu ada asset/modal yang dimiliki, diantaranya asset tanah, peralatan, mesin, gedung bangunan, jalan, instalansi, jaringan dan lain-lainnya. Adapun data asset/modal Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4 Data Asset Dinas Pertanian Kab. Cirebon Tahun 2017-2020

No	Uraian	Tahun (Rp)			
		2017	2018	2019	2020
1.	Tanah	6,371,896,532	7,118,650,932	7,118,650,932	8,597,930,932
2.	Peralatan dan Mesin	9,174,136,496	10,608,294,096	12,015,679,366	12,213,885,839
3.	Gedung & Bangunan	23,328,983,849	26,009,857,407	26,881,848,407	29,648,250,907
4.	Jalan Irigasi & Jaringan	3,051,851,446	3,630,416,888	3,697,999,888	2,291,667,960
5.	Aset Tetap Lainnya	659,308,500	687,208,500	1,100,488,500	1,185,338,500
7.	Aset Lain-lain	367,915,000	367,915,000	367,915,000	358,339,999
8.	Aset Rusak Berat	2,189,586,130	315,125,000	310,650,000	3,178,387,423
9.	BMD Non-Kapitalisasi	619,053,881	643,652,583	576,851,384	600,693,784
	Jumlah Total	42,586,176,823	49,013,205,406	52,070,083,477	58,074,495,344

2.2.3 Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon

Sampai tahun 2020 tercatat 100.839 orang petani di Kabupaten Cirebon yang mendapat pembinaan dari Dinas Pertanian melalui 223 orang penyuluh. Jumlah petani tersebut tergabung dalam 3.190 kelompok dan 414 gabungan kelompok tani. Selengkapnya tertuang pada Tabel 2.5.

No	Kecamatan	Luas Lahan Sawah (Ha)	Jumlah Petani (org)	Jumlah Poktan	Jumlah Gapoktan	Jumlah Penyuluh (org)
1	Waled	1786	3073	131	12	8
2	Pasaleman	920	2667	129	7	2
3	Ciledug	697	1510	45	10	2
4	Pabuaran	518	1721	72	7	4
5	Losari	1436	3342	51	10	7
6	Pabedilan	1677	2919	68	13	7
7	Babakan	1450	2601	105	14	2
8	Gebang	1705	2760	90	13	6
9	Kr.Sembung	1310	1725	78	8	5
10	Kr.Wareng	1047	1499	67	9	3
11	Lemahabang	971	1692	70	13	3
12	Susukan Lebak	1352	2127	49	13	5
13	Sedong	1265	3911	52	10	4
14	Astanajapura	1392	3212	59	11	5
15	Pangenan	1170	2098	85	9	3
16	Mundu	911	1625	38	12	5
17	Beber	1059	2528	66	10	5
18	Greged	839	4426	67	10	5
19	Talun	689	1628	44	11	3
20	Sumber	839	2427	84	14	6
21	Dukupuntang	1261	2950	100	13	8
22	Palimanan	999	1841	46	12	5
23	Gempol	985	2220	75	8	5
24	Plumbon	670	1689	75	15	4
25	Depok	644	1787	59	12	7
26	Weru	230	804	37	9	4
27	Plered	680	1155	50	10	5
28	Kedawung	116	497	40	8	4
29	Tengah Tani	464	1116	33	8	3
30	Gunung Jati	975	2011	95	15	2
31	Kapetakan	3000	4259	119	9	8
32	Suranenggala	1550	2429	105	9	8
33	Klangenan	1479	2801	52	9	7
34	Jamblang	1167	1866	48	8	7
35	Arjawinangun	1383	2411	84	11	8
36	Panguragan	1686	2604	93	9	9
37	Ciwaringin	1146	2942	92	8	8
38	Susukan	3656	6339	138	12	9
39	Gegesik	5223	5864	71	4	9
40	Kaliwedi	2232	3763	328	9	13
	Jumlah	52579	100839	3.190	414	223

2.3 Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon 2020

2.3.1. Capaian Indikator kinerja kunci (IKK)

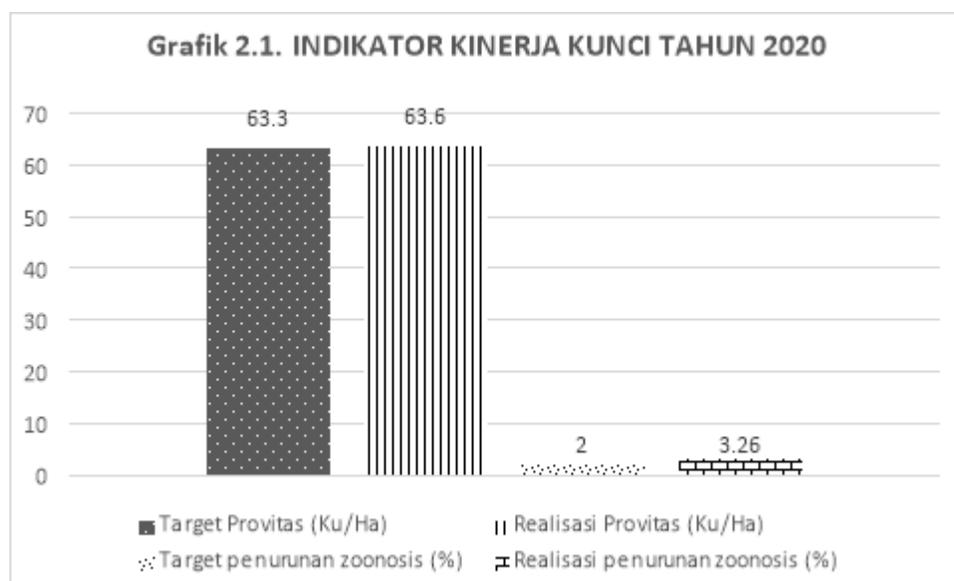
Ada beberapa urusan yang harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah diantaranya urusan wajib dan urusan pilihan. Selain itu ada urusan yang menjadi kewenangan pusat yang penyelenggaraannya diserahkan ke daerah. Dalam upaya mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke pemerintahan daerah maka ditetapkan indikator kinerja kunci (IKK) yang akan menjadi gambaran keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan. Dalam pelaksanaan penetapan IKK tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Indikator Kinerja Kunci (IKK) outcome Dinas Pertanian Kabupaten/ kota:

1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun.

Target produktivitas pertanian di Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 adalah 63,30 kw dan tercapai 63,60 kw;

2. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular. Target di Kabupaten Cirebon tahun 2020 adalah 2 persen dan tercapai 3,26 persen.



Keberhasilan pencapaian produktivitas tahun 2020 didukung dengan cuaca, pada saat musim kemarau masih ada hujan sehingga petani masih bisa menanam dan kebutuhan airnya tercukupi. Sementara pencapaian penurunan zoonosis terjadi karena adanya upaya pencegahan melalui vaksinasi ND/AI dan rabies.

Sementara untuk indikator kinerja kunci output di Dinas pertanian Kabupaten/Kota menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 adalah:

1. Pendukung produksi

a. Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan;

Yaitu jumlah sarana pertanian yang diberikan kepada petani diantaranya benih padi (347.575 kg), pupuk non subsidi (pupuk pembenah tanah 4.000 kg, pupuk hayati 19.200 liter), pestisida 8.284 liter, pompa air 57 unit, traktor 13 unit. Sarana-sarana tersebut berasal dari anggaran APBN Tugas Perbantuan tahun 2020.

b. Prasarana pertanian yang digunakan;

Yaitu jumlah prasarana pertanian dominan yang digunakan oleh petani jalan usaha tani (6,3 km) dan rehab jaringan irigasi yang berdampak terhadap lahan seluas 1.500 ha.

c. Penerbitan izin usaha pertanian;

Yaitu jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian diantaranya izin kios saprodi 7 unit, rekomendasi alih fungsi lahan 158,99 Ha, surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) 2.457 surat, surat keterangan kesehatan bahan asal hewan (SKKBAH) 3.725 surat dan rekomendasi peternakan unggas dan ruminansia 1 surat.

d. Persentase prasarana yang digunakan;

Yaitu jumlah prasarana yang aktif digunakan dibandingkan dengan jumlah prasarana yang dibangun (100%).

e. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di Kab/kota;

Yaitu jumlah usulan yang difasilitasi dibandingkan dengan jumlah usulan usaha pertanian. Jumlah usulan yang masuk ke Dinas Pertanian seluruhnya mendapat rekomendasi (100%).

1. Penanggulangan bencana pertanian:

a. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana;

Yaitu jumlah area yang dapat ditanggulangi dibandingkan dengan luas area yang terkena bencana. Pada tahun 2020 hanya 54% area yang dapat ditanggulangi bencananya.

2.3.1. Capaian Indikator kinerja Utama (IKU)

Ada tiga sasaran yang akan dicapai Dinas Pertanian pada Renstra 2019-2024 yaitu meningkatkan produksi sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan terhadap PDRB, Meningkatnya

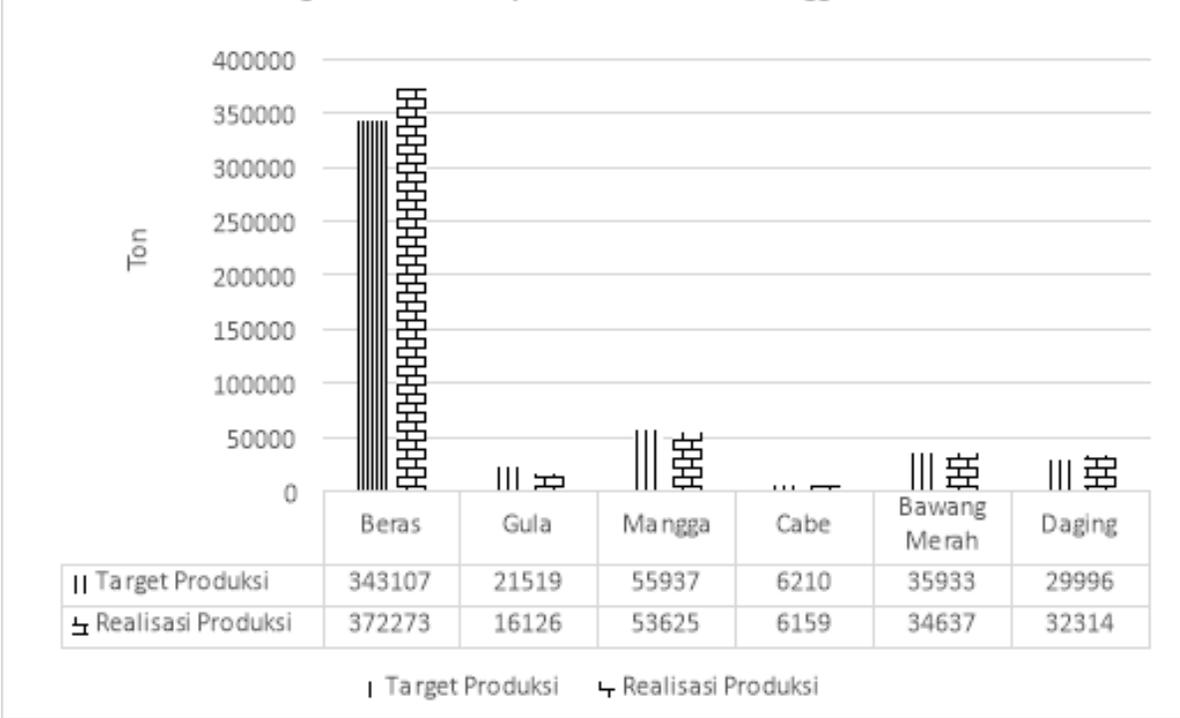
kapasitas kelembagaan kelompok tani dan Meningkatnya kapabilitas Sumber Daya Aparatur. Pencapaian sasaran tahun 2020, (1) meningkatkan produksi sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan terhadap PDRB di Dinas Pertanian adalah Beras 143% dari target; Bawang merah, cabai besar, dan mangga 122,50% dari target; Sapi potong, ayam ras, unggas lokal, dan domba 101,76% dari target; Gula dan kelapa 73,33%. Pada sasaran (2) “Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok tani” capaiannya sebesar 124,40% dari target. Pada sasaran (3) “Meningkatnya kapabilitas Sumber Daya Aparatur” mencapai 107,64% dari target.

Tabel 2.6. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran & Realisasi		Capaian %	Kriteria
				Target	Realisasi		
1	Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Meningkatkan produksi sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan terhadap PDRB	Laju produksi sektor tanaman pangan (beras) (%)	1	1,434	143	Memuaskan
			Laju produksi sektor hortikultura (bawang merah, cabai besar, dan mangga) (%)	0,4	0,487	122,50	Memuaskan
			Laju produksi sektor perkebunan (gula, dan kelapa) (%)	0,6	0,444	73,33	Cukup
			Laju produksi sektor peternakan (sapi potong, ayam ras, unggas lokal, dan domba) (%)	1,7	1,725	101,76	Memuaskan
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok tani	Prosentase kelas kelompok petani utama dan madya (%)	4,59	5,71	124,40	Memuaskan
		Meningkatnya kapabilitas Sumber Daya Aparatur	Nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM) SKPD (poin)	77,00	82,88	107,64	Memuaskan

Sementara itu pencapaian produksi untuk komoditas unggulan pertanian pada tahun 2020 tergambar pada Grafik 2.2.

Grafik 2.2. target dan realisasi produksi komoditas unggulan TAHUN 2020



Tabel 2.7.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian

Kabupaten Cirebon

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra SKPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Pada Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	16	17	18	19	20	21	21
	Produksi																		
1	Beras (Ton)	413.085	425.477	438.242	451.389	464.931	343.107	309.846	384.038	310.456	365.216	365.521	372.732	75,0	90,3	70,8	80,9	78,6	108,6
2	Daging (Ton)	16.841	20.722	28.109	29.106	29.493	29.996	3.941	3.980	3.973	3.830	3.846	32.314	23,4	19,2	14,1	13,2	13,0	107,7
3	Gula (Ton)	34.965	36.343	37.755	39.201	40.680	21.519	28.827	27.126	25.792	19.263	17.746	15.772	82,4	74,6	68,3	49,1	43,6	73,3
4	Bawang merah (Ton)	35.481	40.484	38.373	35.647	35.789	35.933	35.481	40.484	38.373	35.647	37.093	28846	100,0	100,0	100,0	100,0	103,6	80,3
5	Cabe merah (Ton)	3.597	6.502	5.521	6.161	6.186	6.210	3.597	6.502	5.521	6.160	7.122	4261	100,0	100,0	100,0	100,0	115,1	68,6
6	Mangga (Kw)	39.445	30.363	38.417	55.491	55.714	55.937	39.445	30.363	38.417	55.491	54.978	54.978	100,0	100,0	100,0	100,0	98,7	98,3

Secara umum produksi hasil pertanian dipengaruhi oleh kondisi lahan, air, iklim, sarana prasarana pertanian serta kelembagaan sedangkan untuk produksi hasil peternakan dipengaruhi oleh bibit, pakan dan manajemen.

- Produksi beras pada tahun 2020 mencapai 372.732 ton atau tercapai 108,50% dari target 343.107 ton. Sementara itu, laju produksi beras pada tahun 2020 sebesar 5,29%, yaitu meningkat dari produksi 353.560 ton pada tahun 2019 menjadi 372.273 ton pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2019 terjadi kemarau yang cukup panjang sehingga menimbulkan pencapaian luas tanam yang tidak sesuai harapan dan menimbulkan puso yang cukup luas dan berpengaruh pada produksi, sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan produksi disebabkan adanya kemarau basah yang membantu tercapainya luas tanam, luas panen dan produksi, sehingga mengurangi puso yang disebabkan kekeringan.
- Laju produksi sektor hortikultura (Mangga, Bawang Merah, dan Cabai Merah) pada tahun 2020 sebesar 9,60%. Nilai ini jauh melampaui target laju produksi sektor hortikultura pada tahun 2020 yang sebesar 0,40%.
 - o Produksi sektor hortikultura untuk komoditas mangga pada tahun 2020 sebesar 53.625 ton atau tercapai 95,86% dari target 55.937 ton. Produksi mangga tahun 2020 tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 dengan laju produksi sebesar 14,51% atau meningkat menjadi 53.625 ton pada tahun 2020 dari 46.831 ton pada tahun 2019. Produksi mangga meningkat disebabkan karena kondisi cuaca yang mendukung (angin tidak kencang sehingga buah mangga tidak rontok) dan petani sudah banyak yang memasang perangkap lalat buah (mengurangi jumlah mangga yang busuk).
 - o Capaian produksi sektor hortikultura untuk komoditas bawang merah sebesar 93,32%, yaitu terealisasi sebesar 34.636 ton dari target 35.933 ton. Laju produksi Bawang merah pada tahun 2020 mengalami peningkatan 3,29% dari produksi sebesar 33.532 ton pada 2019 menjadi 34.636 ton pada tahun 2020. Produksi pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 karena luas tanam bertambah 5,12% sehingga berbanding lurus dengan hasil panen.
 - o Komoditas Cabai merah mengalami capaian sebesar 89,34%, dari target 6.210 ton terealisasi sebesar 6.159 ton. Dengan laju produksi bawang merah yang mengalami kenaikan sebesar 11,01% dari 5.548 ton pada 2019 menjadi 6.159 ton di tahun 2020. Produksi

mengalami kenaikan dari tahun 2019 karena pada tahun 2020 luas tanam bertambah sehingga meningkatkan hasil produksi cabe merah.

- Realisasi laju produksi sektor perkebunan (Gula dan Kelapa) pada tahun 2020 sebesar 8,30% dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,60%.
 - o Capaian produksi sektor perkebunan untuk produk gula pada tahun 2020 mencapai 73,29% atau terealisasi 15.772 ton dari target 21.519 ton. Laju produksi tahun 2020 produk gula mengalami kenaikan sebesar 13,60%. Kenaikan ini didukung dari produksi tahun 2019 mencapai 13.884 ton, dan produksi 2020 mencapai 15,772 ton. Penyebab meningkatnya produksi tersebut karena adanya perluasan areal tanam sekitar 200 ha di tahun 2020, adanya dukungan bantuan pupuk dr pusat melalui kegiatan rawat ratoon dgn alokasi 1000 ha, penurunan angka kebakaran lahan di th 2020, dan kenaikan rendemen di thn giling 2020.
 - o Komoditas kelapa memiliki nilai capaian sebesar 101,84% atau terealisasi 360 ton lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 354 ton. Laju produksi kelapa mengalami kenaikan sebesar 3,15% dari produksi tahun 2019 yang hanya sebesar 349 ton menjadi 360 ton di tahun 2020.
- Pada sektor peternakan (daging sapi potong, daging ayam ras, daging unggas lokal, daging domba) memiliki Laju produksi sebesar 8,85% atau lebih besar dari target sebesar 1,70% di tahun tahun 2020.
 - o Nilai capaian pada daging sapi potong memiliki nilai capaian sebesar 112,46% atau terealisasi 4.372 ton lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 3.888 ton. Laju produksi daging sapi mengalami kenaikan sebesar 17,69% dari produksi tahun 2019 yang hanya sebesar 3.715 ton menjadi 4.372 ton di tahun 2020. Penyebabnya adalah produksi meningkat ditahun 2020 karena adanya peningkatan jumlah pemotongan sapi impor (BX).
 - o Pada daging ayam ras memiliki nilai capaian sebesar 120,17% atau terealisasi 24.437 ton lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 20.336 ton. Laju produksi daging ayam ras mengalami kenaikan sebesar 16,88% dari produksi tahun 2019 hanya sebesar 20.908 ton menjadi 24.437 ton di tahun 2020. Produksi meningkat karena adanya peningkatan populasi ternak.
 - o Capaian daging unggas lokal memiliki nilai sebesar 102,25% dengan realisasinya sebesar 1.844 ton lebih tinggi dari nilai yang ditargetkan sebesar 1.803 ton. Laju produksi daging unggas lokal

mengalami penurunan sebesar 0,44% dari produksi tahun 2019 yang hanya sebesar 1.836 ton menjadi 1.844 ton di tahun 2020. Penyebab produksi tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 karena adanya peningkatan populasi. Peningkatan populasi ini didukung dengan adanya program Inseminasi Buatan, dan AUTS (Asuransi Usaha Ternak Sapi).

- o Pada daging domba memiliki nilai capaian sebesar 41,87% atau terealisasi 1.662 ton lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 3.969 ton. Laju produksi daging sapi mengalami kenaikan sebesar 2,64% dari produksi tahun 2019 yang hanya sebesar 1.619 ton menjadi 1.662 ton di tahun 2020. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan populasi. Peningkatan populasi ini didukung dengan adanya program Inseminasi Buatan, dan AUTS (Asuransi Usaha Ternak Sapi).

Dalam upaya melayani petani maka Dinas Pertanian memiliki beberapa mitra kerja yang masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda namun saling melengkapi.

a. Lahan dan air

Kabupaten Cirebon memiliki luas wilayah 97,965 Ha dengan lahan pertanian tahun 2020 seluas 52,579 Ha dan lahan bukan pertanian 45,374 Ha, dengan demikian potensi Kabupaten Cirebon untuk pengembangan pertanian sangat besar, namun dalam perjalanannya pemanfaatan lahan pertanian masih tarik ulur dengan sektor lain, oleh karenanya perlu di sinergikan pengembangan sarana prasarana serta infrastruktur pertanian sehingga dapat memaksimalkan potensi yang ada. Berkaitan ketersediaan air dan pemanfaatan lahan maka Dinas Pertanian bermitra dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

b. Teknologi

Penerapan teknologi pertanian akan terus diupayakan dengan harapan dapat meningkatkan produksi hasil pertanian. Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Pertanian melakukan kerja sama dengan balai-balai penelitian dan pengembangan dalam upaya melakukan diseminasi teknologi kepada petani untuk optimalisasi budidaya berbasis inovasi dalam rangka meningkatkan daya saing diantaranya dengan Balai Penelitian Buah Solok, Balai Penelitian Penyakit Hewan Cinagara, Balai Penelitian Benih Padi Sukamandi.

c. Data

Luas lahan pertanian pada tahun 2020 mencapai 52,579 Ha atau 53.68% dari luas wilayah Kabupaten Cirebon (97,965 Ha). Untuk mengukur keberhasilan produktivitas produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Dinas Pertanian bermitra dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menyusun data-data produksi. Pada tahun 2018, BPS merilis data produksi padi dengan menggunakan metode baru, yaitu metode Kerangka Sampel Area (KSA) yang merupakan teknik pendekatan pengambilan sampel yang menggunakan area lahan sebagai unit enumerasi. Sistem ini berbasis teknologi sistem informasi geografi (SIG), penginderaan jauh, teknologi informasi dan statistika untuk perolehan data dan informasi pertanian tanaman pangan untuk memperbaiki metodologi perhitungan data padi yang selama ini digunakan. Penggunaan basis KSA dalam menentukan sampel ubinan adalah untuk mengurangi risiko lewat panen sehingga perhitungan menjadi lebih akurat.

d. Ketersediaan Sarana pendukung Produksi dan Pemasaran

Sarana pendukung produk pertanian yang biayanya cukup besar seringkali menjadi kendala untuk petani. Saat ini sudah mulai ada pola kemitraan dengan pihak Bank atau swasta yang berperan menjadi offtaker baik untuk sarana produksi maupun pemasaran hasil pertanian. Offtaker berperan mengambil alih semua biaya yang harus ditanggung petani pada saat memproduksi maupun mengambil semua hasil panen petani.

2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Perangkat Daerah

Dinas pertanian merupakan salah satu perangkat daerah sebagai penghasil pendapatan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (terdiri dari Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah). Target dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Dinas Pertanian dari tahun 2016-2020 tersaji pada Tabel 2.8.

Sumber pendapatan retribusi berasal dari pasar hewan yaitu pemakaian prasarana pasar dan pemeriksaan kesehatan hewan (hewan besar, hewan kecil dan unggas). Capaian PAD di pasar hewan mulai tahun 2016-2020 rata-rata meningkat 0,8%.

Sementara untuk retribusi rumah potong di hewan sumbernya berasal dari pemakaian prasarana dan jasa pemotongan hewan (sapi dan unggas) di rumah potong hewan. Seiring dengan meningkatnya pemotongan sapi BX di rumah potong hewan maka realisasi capaian PAD dari retribusi RPH

mengalami peningkatan setiap tahunnya rata-rata 7,6% mulai dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2021 akibat harga sapi BX naik maka jagal memilih untuk memotong sapi lokal sehingga terjadi penurunan jumlah pemotongan sapi di RPH dari 25-30 ekor per hari menjadi 15-18 ekor per hari.

Selain itu sumber PAD di Dinas Pertanian adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Dinas Pertanian dihasilkan melalui penjualan benih bersertifikat yang kegiatannya dilaksanakan di lahan milik pemerintah daerah. Perbenihan diperoleh dari kegiatan penangkaran benih unggul di tanah milik pemerintah daerah di Desa Blender, Desa Cibogo dan Suranenggala. Kendala yang sering dihadapi dalam kegiatan perbenihan adalah faktor cuaca yang menyebabkan bencana pertanian, terutama banjir dan kekeringan.

Tabel 2.8. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon

No.	SUMBER PAD	Tahun														
		2016			2017			2018			2019			2020		
		Target	Realisasi	%												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	6	17	18
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	364.132.500	416.370.000	114,3	382.491.000	410.087.700	107,2	410.855.000	476.289.300	115,9	418.300.000	493.622.900	118,0	417.855.000	467.259.100	111,8
	HASIL RETRIBUSI DAERAH	364.132.500	416.370.000	114,3	382.491.000	410.087.700	107,2	410.855.000	476.289.300	115,9	418.300.000	493.622.900	118,0	417.855.000	467.259.100	111,8
1	Retribusi Pelayanan Pasar	60.000.000	72.754.000	121,3	61.500.000	73.133.000	118,9	63.000.000	74.605.000	118,4	66.000.000	75.817.000	114,9	69.000.000	73.415.000	106,4
2	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	189.682.500	196.752.800	103,7	192.430.000	188.042.500	97,7	195.580.000	203.890.000	104,2	200.025.000	204.182.500	102,1	195.580.000	196.903.000	100,7
3	Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)	114.450.000	146.863.200	128,3	128.561.000	148.912.200	115,8	152.275.000	197.794.300	129,9	152.275.000	213.623.400	140,3	153.275.000	196.941.100	128,5
	RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI/USAHA DAERAH	189.682.500	196.752.800	103,7	192.430.000	188.042.500	97,7	195.580.000	203.890.000	104,2	195.580.000	204.182.500	104,4	195.580.000	196.903.000	100,7
1	Perbenihan padi	189.682.500	196.752.800	103,7	192.430.000	188.042.500	97,7	195.580.000	203.890.000	104,2	195.580.000	204.182.500	104,4	195.580.000	196.903.000	100,7

Dinas pertanian merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk menjalankan tugas tersebut maka Dinas Pertanian didukung dengan anggaran belanja daerah yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran serta tujuan perangkat daerah. Anggaran belanja Dinas Pertanian mulai tahun 2015-2020 selengkapnya tertuang pada Tabel 2.9.

Pada tahun 2015-2019 merupakan periode Renstra 2014-2019 sementara tahun 2020 termasuk ke periode Renstra 2019-2024 sehingga pada tahun 2020 ada beberapa program yang tidak muncul kembali. Hal ini disebabkan pada periode Renstra tahun 2014-2019 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Sementara periode Renstra 2019-2024 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019. Program pendukung produksi pertanian pada periode Rencana Strategis tahun 2015-2019 adalah:

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
5. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
8. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi
10. Program pengendalian alih fungsi lahan

Sementara pada periode Renstra 2019-2024 program pendukung produksi pertanian yang dilaksanakan adalah:

1. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
3. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
4. Program penanggulangan dan pencegahan penyakit hewan
5. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
6. Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Apabila diurai berdasarkan jenis belanja maka anggaran yang difasilitasi dalam mendukung pencapaian produksi pertanian mulai tahun 2015-2019 berkisar pada rasio 61-96. Pola anggaran pada belanja langsung dan belanja tidak langsung cukup mendukung pencapaian

sasaran perangkat daerah Dinas Pertanian, namun apabila dihitung pertumbuhan anggaran dan realisasinya terlihat menurun untuk setiap tahunnya selama tahun 2015-2020.

TABEL 2.9.1 TARGET DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015-2020

TAHUN	PAGU		REALISASI		RASIO		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	BTL	BL	BTL	BL	BTL	BL	BTL	BL
2015	9.806.268.500	42.310.775.069	9.294.521.344	38.676.744.199	95	91	0	0
2016	9.860.594.625	20.378.480.256	9.501.918.757	19.518.239.322	96	96	0,55	-51,84
2017	18.717.073.550	34.861.973.976	16.944.844.199	30.602.542.398	91	88	89,82	71,07
2018	24.331.157.750	32.296.823.971	23.166.159.087	28.737.208.851	95	89	29,99	-7,36
2019	28.327.956.000	23.953.409.143	23.648.743.116	21.804.500.164	83	91	16,43	-25,83
2020	39.977.350.750	8.281.394.656	24.284.190.913	7.559.268.325	61	91	41,12	-65,43
Ket :	BTL = Belanja tidak langsung							
	BL = Belanja langsung							

Sementara itu realisasi anggaran yang difasilitasi dalam mendukung pencapaian produksi pertanian mulai tahun 2015-2019 berkisar pada rasio 58-99. Pola anggaran pada setiap program terlihat fluktuatif setiap tahunnya, namun apabila dihitung pertumbuhan anggaran dan realisasinya terlihat menurun untuk setiap program selama tahun 2015-2020.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan dan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dari tahun 2015-2020 anggarannya meningkat, hal ini disebabkan pada ketiga program tersebut terdapat usulan-usulan hasil musrenbang dan usulan-usulan aspirasi. Kegiatan-kegiatan yang diusulkan melalui musrenbang dan aspirasi diantaranya penyediaan alat mesin pertanian, pelaksanaan kaji terap dan pelatihan petani serta pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat.

Tabel 2.9.2. Pencapaian Target dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Dinas Pertanian 2015-2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Anggaran Tahun (Juta)						Realisasi Anggaran Tahun (Juta)						Rasio Antara realisasi dan Anggaran Pada Tahun						Rata-rata Pertumbuhan			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi		
1	2	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
	Program pendukung peningkatan produksi																						
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	33.641	12.069	16.918	11.096	5.383	-	30.624	11.403	16.276	9.840	4.853	-	91	94	96	89	90	-	-	42	-	42
2	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	-	-	4.390	3.849	2.657	-	-	-	2.226	3.408	2.589	-	-	-	51	89	97	-	-	29	-	14
3	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	263	-	229	191	224	-	259	-	200	165	221	-	99	-	87	86	99	-	-	40	-	37
4	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	324	-	2.368	1.814	1.808	314	285	-	1.641	1.637	1.494	294	88	-	69	90	83	94	-	41	-	38
5	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	177	1.782	4.035	3.893	1.683	2.842	175	1.723	3.940	3.412	1.639	2.544	98	97	98	88	97	89	208		201	
6	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	-	-	875	685	1.669	348	-	-	508	501	1.094	174	-	-	58	73	66	50	9		7	
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	309	971	941	1.225	760	270	307	962	928	681	747	262	99	99	99	56	98	97	28		26	
8	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	288	408	468	2.879	1.594	467	284	400	394	2.774	1.537	416	99	98	84	96	96	89	91		105	
9	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	-	142	1.255	1.116	1.979	367	-	141	1.166	994	1.848	367	-	99	93	89	93	100	153		143	
10	Program pengendalian alih fungsi lahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon 2019-2024

Gambaran pelayanan Dinas Pertanian selama 5 tahun sebelumnya, menjadi motivasi untuk senantiasa melaksanakan perbaikan kinerja untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Selain itu masih rendahnya kesejahteraan petani juga menjadi pendorong perangkat daerah Dinas Pertanian untuk meningkatkan hasil produksi pertanian di Kabupaten Cirebon.

Indonesia telah mengadopsi kesepakatan internasional tentang agenda *Sustainable Development Goal's (SDG's)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diterbitkan pada 4 Juli 2017. Hal ini menunjukkan konsistensi pemerintah untuk melembagakan agenda TPB ke dalam program pembangunan nasional. Perpres tersebut menekankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui empat platform partisipasi, yaitu pemerintah termasuk Pemerintah Daerah dan parlemen, filantropi dan bisnis, ormas, akademisi dan pakar dalam rangka menyukseskan pelaksanaan agenda TPB.

Berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Cirebon memiliki kepentingan dan komitmen yang kuat untuk turut berpartisipasi dalam pencapaian SDG's, mengingat berdasarkan permasalahan di atas, masih terdapat tujuan pembangunan yang memang masih harus dituntaskan oleh Pemerintah Kabupaten. Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2023, maka Kabupaten Cirebon hanya melaksanakan 7 tujuan dengan 174 indikator TPB yang menjadi wewenang kabupaten. Dari 174 indikator yang ditetapkan dalam TPB Kabupaten Cirebon, hanya 61 (35,06%) indikator yang memiliki data sedangkan sebanyak 113 (64,94%) indikator tidak tersedia data.

Dinas Pertanian sebagai bagian dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tujuan pembangunan bersama (TPB) yang tertuang dalam dokumen kajian lingkungan hidup akan mendukung untuk pencapaian 2 tujuan yaitu :

1. Tujuan kedua yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

2. Tujuan kedelapan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Mengacu pada hal-hal tersebut maka Dinas Pertanian sampai tahun 2024 akan fokus pada peningkatan produksi komoditas pertanian unggulan (beras, gula, manga, bawang merah, cabe merah, daging domba dan daging unggas lokal). Dalam upaya mewujudkan peningkatan produksi komoditas pertanian unggulan ada beberapa hal yang menjadi **pendukung** dalam pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Cirebon diantaranya adalah:

Luas lahan pertanian pada tahun 2020 mencapai 52.579 Ha atau 53.68% dari luas wilayah Kabupaten Cirebon (97,965 Ha);

- a. Sumberdaya manusia tersedia dalam jumlah yang cukup (103.818 orang atau 11% masyarakat Kabupaten Cirebon menekuni sektor pertanian);
- b. Memiliki potensi untuk pengembangan beragam komoditas pertanian (beras, gula, mangga, cabe merah, bawang merah, domba, unggas lokal);
- c. Ketersediaan jaringan irigasi sepanjang 1.169 km;
- d. Meningkatnya kebutuhan daging untuk memenuhi wisata kuliner.

Selain itu dalam pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Cirebon ada beberapa hal yang menjadi **penghambat** diantaranya adalah:

- a. Belum adanya Peraturan Daerah yang melindungi lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B);
- b. Keterbatasan dan penurunan kapasitas sumberdaya lahan akibat eksploitasi yang berlebihan;
- c. Sistem diseminasi teknologi tidak fokus (terhadap komoditas unggulan);
- d. Kelembagaan petani dan posisi tawar petani rendah;
- e. Jaringan irigasi yang ada belum berfungsi optimal (banyak saluran mengalami pendangkalan, kerusakan bangunan irigasi dan jaringan irigasi terputus akibat adanya bangunan);
- f. Kebutuhan ternak potong masih dipenuhi dari luar Kabupaten Cirebon.

Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon 2019-2024 diantaranya adalah:

- a. Meningkatnya kebutuhan bahan pangan untuk konsumsi dan penyediaan bahan baku industri;

- b. Daya dukung kondisi agroklimat di Kabupaten Cirebon mendukung pengembangan sektor pertanian
- c. Meningkatnya pemahaman dan permintaan terhadap green product (produk pertanian ramah lingkungan);
- d. Tumbuhnya dukungan dari lembaga-lembaga penyandang dana melalui pola kemitraan usaha;
- e. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Sementara yang menjadi ***tantangan*** untuk mencapai peningkatan produksi komoditas unggulan diantaranya adalah:

- a. Kabupaten Cirebon tidak memiliki sumber air.
- b. Terjadi kekeringan pada musim kemarau dan banjir menggenangi areal pertanian pada musim hujan;
- c. Rantai tataniaga yang panjang dan sistem pemasaran yang belum terjangkau.
- d. Rendahnya penjaminan keamanan dan mutu pangan.

Dalam upaya mendukung peningkatan produksi hasil komoditas pertanian unggulan maka perlu dilaksanakan beberapa kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Cirebon untuk tahun 2022-2024 yaitu :

- a. Penyediaan Bibit Unggul Bersertifikat
Sebagai Insentif LP2B agar melindungi lahan-lahan pertanian dan pelaksanaannya akan diupayakan melalui pengelolaan lahan-lahan pertanian menjadi penangkaran benih.
- b. Asuransi Usaha Tani Padi (Insentif LP2B)
Pemberian subsidi asuransi dalam rangka melindungi usaha petani dari ancaman bencana alam.
- c. Jalan Usaha Tani (Inventarisasi)
Mendukung pembangunan jalan usaha tani untuk memudahkan mobilisasi sarana produksi serta hasil panen.
- d. Revitalisasi Jaringan Irigasi Tersier
Perbaikan saluran jaringan irigasi tersier untuk menjaga ketersediaan air mendukung peningkatan indeks pertanaman.
- e. Revitalisasi Mangga Gedong Gincu (diintervensi kementerian dengan dana upland untuk peningkatan produktivitas dan nilai tambah).
- f. Pengembangan demplot (memberikan contoh konkrit petani dengan penerapan teknologi dan inovasi beberapa komoditi sektor pertanian).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Proses pembangunan yang dilaksanakan perlu memperhatikan potensi dan permasalahan. Permasalahan adalah senjang harapan antara kondisi daerah saat ini dengan kondisi ideal atau target rencana di berbagai bidang. Dalam melaksanakan pembangunan pertanian, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga tidak lepas dari berbagai permasalahan. Menganalisis permasalahan pokok pembangunan pertanian merupakan bagian dari upaya memahami permasalahan yang muncul pada sektor pertanian agar ditemukan kebijakan dan strategi untuk menyelesaikan akar permasalahannya.

Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon selama kurun waktu 3 tahun ke depan akan fokus pada peningkatan produksi beras dan komoditas unggulan pertanian lainnya yang pencapaiannya akan didukung dengan pelaksanaan program-program strategis. Hal ini membutuhkan kerja bersama karena saat ini produksi hasil pertanian masih rendah sehingga menjadi masalah pokok yang dihadapi sektor pertanian. Hasil analisis menyimpulkan rendahnya produksi hasil pertanian dipermasalahkan lebih teknis disebabkan akibat beberapa hal yaitu:

- a. Terbatasnya pemanfaatan sarana produksi yang berkualitas;
- b. Belum optimalnya ketersediaan prasarana produksi pertanian;
- c. Rendahnya adaptasi teknologi di sektor pertanian;
- d. Belum optimalnya penerapan pertanian berkelanjutan;
- e. Rendahnya fungsi kelembagaan petani;
- f. Terbatasnya jaringan pemasaran hasil pertanian;
- g. Belum optimalnya upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h. Rendahnya kemampuan permodalan petani.

Terbatasnya pemanfaatan sarana produksi yang berkualitas, akar masalahnya antara lain:

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan benih/ bibit unggul;
- 2) Ketersediaan pupuk subsidi yang terbatas (ada penurunan jumlah kuota pupuk bersubsidi setiap tahun);
- 3) Pergeseran jadwal tanam menyebabkan bergesernya jadwal pemupukan sehingga mengganggu kuota pupuk bersubsidi yang telah disiapkan;

4) Terbatasnya pengelolaan alat mesin pertanian secara optimal.

Belum optimalnya ketersediaan prasarana produksi pertanian, akar masalahnya antara lain:

- 1) Banyaknya jaringan irigasi yang rusak;
- 2) Belum tersedianya jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) atau sampai ke petak sawah/ petak bagi;
- 3) Tantangan dan kebutuhan akan alih fungsi lahan.

Rendahnya adaptasi teknologi di sektor pertanian, akar masalahnya antara lain:

- 1) Masih kentalnya budaya masyarakat sehingga enggan menerima inovasi teknologi budidaya pertanian;
- 2) Rendahnya proses diseminasi teknologi kepada petani.

Belum optimalnya penerapan sistem usaha pertanian terpadu (hulu-hilir), akar masalahnya antara lain:

- 1) Belum terintegrasinya usaha tani;
- 2) Belum optimalnya koordinasi perangkat daerah dengan pemerintah desa.

Lemahnya fungsi kelembagaan petani, akar masalahnya antara lain:

- 1) Pengurus dan anggota kelompok tani masih sering berganti;
- 2) Banyaknya kelompok baru yang dibentuk musiman;
- 3) Rendahnya fungsi pengawasan dan pengendalian data base kelompok tani;

Terbatasnya jaringan pemasaran hasil pertanian, akar masalahnya antara lain:

- 1) Terbatasnya jalur distribusi hasil pertanian;
- 2) Masih banyak pola kemitraan pengelolaan dan penanganan pemasaran hasil komoditas pertanian yang merugikan petani;
- 3) Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian.

Belum optimalnya upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, dengan akar masalah yaitu:

- 1) Tingginya potensi bencana banjir dan kekeringan; dan
- 2) Belum optimalnya penanggulangan Organisme pengganggu tanaman (OPT).

Rendahnya kemampuan permodalan petani, dengan akar masalah yaitu:

- 1) Terbatasnya akses permodalan yang baik;
- 2) Masih tingginya resiko gagal panen.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Adapun visi Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagai cerminan visi dari Bupati dan Wakil Bupati Cirebon terpilih periode 2019-2024 adalah:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON YANG BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN”

Dalam Visi Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 tersebut, ada 5 (lima) kata kunci, yakni Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman, yang diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Berbudaya. Mengandung pengertian mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Berbudaya kerap juga diartikan sebagai beradab. Berbudaya dalam konteks ini lebih pada penghargaan atas nilai-nilai yang mengandung keluhuran dan kebaikan yang menjadi tradisi lokal, baik dalam bentuk pengetahuan, sikap, tutur hingga simbol-simbol atas nilai tersebut.

Kedua, Sejahtera. Dimaksudkan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat merasa aman karena terpenuhinya kebutuhan dasar, baik aman secara ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial.

Ketiga, Agamis. Dimaksudkan bahwa agama menjadi landasan nilai dasar masyarakat dalam berperilaku, baik secara individual maupun sosial. Nilai agama yang mengajarkan kebaikan diharapkan mampu menjadi ruh dalam sikap individu, sehingga tercipta suasana yang aman, harmonis dan produktif.

Keempat, Maju. Mempunyai makna menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai daerah yang maju dan meningkat dari kondisi masa lalu. Maju juga berarti pembangunan daerah harus dapat menciptakan peningkatan daya saing yang tinggi baik di tataran regional maupun nasional bahkan internasional, didukung dengan sikap disiplin dan etos kerja serta daya kreasi dan inovasi yang tinggi dari masyarakat dan aparat pemerintah sehingga akan berdampak pada tingkat kemakmuran dan pemerataan ekonomi bagi masyarakatnya. Hal ini dicirikan dengan pertumbuhan ekonomi dari beberapa sektor unggulan yang tinggi, kuantitas infrastruktur daerah guna mendorong peningkatan perekonomian dan akses pelayanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Cirebon agar selaras dengan persaingan pasar produksi yang semakin kompetitif dan siap berperan dalam menghadapi perubahan sistem global. Maju juga dimaksudkan sebagai kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat orang banyak.

Kelima, Aman. Dimaksudkan sebagai kondisi di mana tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram, sehingga diharapkan masyarakat dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, yang menjamin terselenggaranya pembangunan.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan maka visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi, sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat;
2. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi;
3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika;
4. Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah; dan
5. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Berdasarkan misi diatas, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan Misi ke-empat yaitu Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut maka renstra dan Perubahan Rencana strategis Tahun 2019-2024, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon memiliki tujuan untuk “Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB”.

Salah satu makna visi yang diusung Pemerintah Daerah pada misi “MAJU” yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sektor pertanian termasuk sektor yang banyak di tekuni oleh masyarakat di Kabupaten Cirebon (11% dari jumlah penduduk), sehingga diharapkan

melalui peningkatan produksi komoditas unggulan sektor pertanian akan dapat mendukung peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.

Meningkatnya produksi hasil pertanian akan sangat bermakna terhadap peningkatan pendapatan petani apabila ada keberpihakan pemerintah daerah terhadap petani, mengingat seringkali terjadi penurunan harga jual hasil produksi pertanian pada saat panen raya sehingga berlaku hukum ekonomi dimana permintaan konsumen (demand) tetap sementara pasokan (supply) berlimpah sehingga harga menjadi rendah. Pada kondisi tersebut perlu peran perangkat daerah yang memiliki kewenangan dibidang pemasaran serta penyediaan pangan daerah untuk melakukan intervensi dan penyiapan regulasi agar petani tetap mendapat harga yang sesuai.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Renstra Provinsi

Dalam rangka mewujudkan visi “Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian; serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (impact) dari tercapainya outcome program/kegiatan pembangunan pertanian.

Tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan;
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian;
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memerhatikan hasil evaluasi

kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat.

Tabel 3.1 Telaah Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

No	Sasaran Renstra Kementerian Pertanian	Permasalahan PD terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Rendahnya produksi hasil pertanian	Terbatasnya pemanfaatan sarana yang berkualitas	luas lahan pertanian di Kabupaten Cirebon 53,68% dari luas total lahan
			Belum optimalnya ketersediaan prasarana pertanian	Berpotensi untuk peningkatan indeks pertanaman
2	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional	Rendahnya kualitas produksi hasil pertanian	Sistem diseminasi teknologi tidak fokus (terhadap komoditas unggulan)	Memiliki potensi untuk pengembangan beragam komoditas pertanian
3	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis	Masih rendahnya upaya penjaminan keamanan dan mutu pangan	Belum optimalnya fungsi pengawasan terhadap keamanan dan mutu pangan	Meningkatkan penerapan praktik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan secara baik (Good Agriculture Practices, Good Handling Practices dan Good Manufacturing Practices)
4	Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian	Belum optimalnya teknologi pada sektor hulu, on farm, hilir	Sistem diseminasi teknologi tidak fokus (terhadap komoditas unggulan)	Meningkatkan indeks penyuluhan
5	Penyediaan prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan	Lahan pertanian, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian belum terkelolanya dengan baik	Belum optimalnya ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai kebutuhan	Berpotensi untuk peningkatan indeks pertanaman
6	Terkendalnya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan	Rendahnya antisipasi, mitigasi dan adaptasi bencana	Budidaya komoditas pertanian masih mengutamakan kearifan tradisi lokal	Mendorong penggunaan benih varietas berumur pendek dan tahan terhadap banjir dan kekeringan

)* Sumber Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024

Dalam upaya melakukan sinkronisasi pembangunan pertanian di Provinsi Jawa Barat, maka Dinas Pertanian melaksanakan telaahan terhadap Renstra beberapa dinas yang terkait tugas pokok dan fungsi untuk menjadi rujukan. Berdasarkan telaahan terhadap sasaran Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan serta Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, maka dapat diketahui permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon beserta faktor penghambat dan faktor pendorong dalam upaya sinkronisasi pembangunan pertanian di Kabupaten Cirebon.

Tabel 3.2. Permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas TPH Provinsi

No	Sasaran Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Permasalahan PD terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Rendahnya produksi hasil pertanian	Terbatasnya pemanfaatan sarana yang berkualitas dan	luas lahan pertanian di Kabupaten Cirebon 53,68% dari luas total lahan
		Lahan pertanian, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian belum terkelola dengan baik	Belum optimalnya ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai kebutuhan	Berpotensi untuk peningkatan indeks pertanaman

Tabel 3.3. Permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas KPP Provinsi

No	Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Permasalahan PD terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya produksi peternakan	Rendahnya produksi hasil pertanian (peternakan)	Terbatasnya pemanfaatan sarana dan prasarana yang berkualitas	Daya dukung kondisi agroklimat di Kabupaten Cirebon mendukung pengembangan sektor peternakan

Tabel 3.4. Permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perkebunan Provinsi

No	Sasaran Renstra Dinas Perkebunan	Permasalahan PD terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya produksi komoditas perkebunan	Rendahnya produksi hasil pertanian	Terbatasnya pemanfaatan sarana yang berkualitas dan	Daya dukung kondisi agroklimat di Kabupaten Cirebon mendukung pengembangan sektor pertanian
		Lahan pertanian, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian belum terkelolanya dengan baik	Belum optimalnya ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai kebutuhan	Berpotensi untuk peningkatan luas tanam perkebunan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009–2029 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2029 bahwa Kabupaten Cirebon ditetapkan ke dalam Wilayah Metropolitan Cirebon Raya. Sebagai Metropolitan Cirebon Raya juga merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang memiliki banyak budaya dan sejarah, pelestarian warisan budaya dan kawasan cagar budaya sebagai daya tarik pariwisata baik skala lokal, regional, nasional, dan internasional.

Potensi pariwisata akan menjadi potensi pemasaran hasil produksi pertanian yang berkualitas. Mencermati hal tersebut, perlu upaya peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian yang dikolaborasikan dengan potensi pariwisata sebagai penggerak pembangunan di Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 disebutkan bahwa Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, harmonis, dan terpadu sebagai sentra pertanian, industri dan pariwisata yang mendukung PKN Cirebon.

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024 disebutkan bahwa kebijakan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, harmonis, dan terpadu, meliputi:

1. Pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
2. Peningkatan keterkaitan dan keterpaduan pengembangan kawasan yang berbatasan dengan kabupaten/kota tetangga.

Strategi untuk pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, meliputi:

1. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya;
2. Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
3. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan beserta prasarana untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan

4. Mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana.

Tabel 3.5. Permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Strategi RTRW Terkait Isu Bidang Pertanian	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Mempertahankan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan;	Belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Cirebon	1. Rendahnya kualitas sarana yang digunakan oleh petani	1. Rencana memberikan insentif terhadap petani yang berada di wilayah lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B)
2.	Mengendalikan alih fungsi peruntukan lahan pertanian pangan berkelanjutan;		2. Terbatasnya ketersediaan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan petani	2. Mendukung revitalisasi jaringan irigasi tersier dan
3.	Meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan ketahanan pangan, penyediaan alat teknologi pra/pasca panen, dan pengembangan pasca pertanian		3. Terbatasnya jaringan pemasaran hasil pertanian	3. Inventarisasi jalan usaha tani (JUT)
4.	Mengembangkan dan memelihara bendungan, waduk, dan situ untuk menjamin ketersediaan air baku bagi kegiatan pertanian;			
5.	Mengembangkan dan memelihara jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi untuk menjamin penyaluran air bagi lahan pertanian.			

Sementara itu dalam penyusunan renstra, perangkat daerah juga melakukan telaahan terhadap dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) terutama isu strategis dan rekomendasi berdasarkan daya dukung daya tampung.

Tabel 3.6. Permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Berdasarkan Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Strategi KLHS Terkait Isu Bidang Pertanian	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Kekeringan sawah	Belum terlaksananya budidaya pertanian berkelanjutan	1. Rendahnya kualitas sarana yang digunakan oleh petani	1. Mendukung pelaksanaan pertanian terintegrasi
2.	Adanya alih fungsi lahan dan hutan		2. Terbatasnya ketersediaan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan petani	2. Mendukung penyediaan prasarana untuk penyimpanan air (embung, dam parit dan long storage)
3.	Penurunan kualitas dan kuantitas hasil pertanian		3. Terbatasnya kemampuan petani dalam menangani bencana pertanian	3. Melakukan pembinaan untuk pelaksanaan pertanian hijau (ramah lingkungan)
4.	Berkurangnya lahan pertanian yang produktif		4. Terbatasnya daya adaptasi petani terhadap teknologi	
5.	Serangan hama dan penyakit pada lahan pertanian			

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Merujuk pada telaahan Renstra kementerian pertanian, renstra perangkat daerah Provinsi Jawa Barat, RTRW dan KLHS maka dapat terlihat simpul bahwa yang menjadi sasaran strategis adalah upaya peningkatan produksi pertanian. Hal ini akan mendapat dukungan melalui potensi sumber daya alam dan manusia khususnya petani serta masyarakat di Kabupaten Cirebon namun pasti akan menemui berbagai macam kendala yang menjadi penghambat dalam upaya pencapaiannya diantara penghambatnya adalah sarana, prasarana dan aspek pemasaran yang belum berfungsi secara optimal serta belum adanya peraturan daerah yang melindungi terhadap lahan-lahan pangan pertanian berkelanjutan.

Tabel 3.6. Telaahan Sasaran Renstra K/L, Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon

No	Sasaran Renstra Kementerian Pertanian	Sasaran Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Sasaran Renstra Dinas Perkebunan	Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kab. Cirebon
1	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Meningkatnya produksi peternakan	Meningkatnya produksi komoditas perkebunan	Meningkatnya produksi hasil pertanian
2	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional				
3	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis				
4	Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian				
5	Penyediaan prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan				
6	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan				

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon yang dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis.

Dalam dokumen perubahan RPJMD 2019-2024 disebutkan bahwa tahun 2019-2024 merupakan pembangunan tahap ke empat dalam RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025. Maka pada tahap ini upaya untuk mencapai keunggulan masyarakat Kabupaten Cirebon dalam segala bidang terus ditingkatkan. Dalam tahap ini akan dilaksanakan upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing antara lain ditandai oleh semakin tingginya solidaritas dan kepedulian sosial masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, semakin tingginya pendapatan dan kemandirian masyarakat, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta makin membaiknya kinerja pengelolaan SDM yang handal. Oleh karena, itu visi dan misi RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 pun mengacu pada hal tersebut.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Dalam proses perumusan tujuan dan sasaran pembangunan pertanian Kabupaten Cirebon, Dinas Pertanian merumuskan sasaran pembangunan yang searah, fokus dan terukur dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan.

Tujuan dan sasaran pembangunan pertanian di Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur, sehingga apa yang akan dicapai atau diubah dalam pembangunan sisa periode renstra pada beberapa tahun kedepan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan pembangunan pertanian oleh Dinas Pertanian disusun secara teknokratik ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kabupaten Cirebon, kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat dan Nasional serta isu-isu strategis pembangunan pertanian.

Dalam menentukan tujuan perangkat daerah, Dinas Pertanian merujuk kepada indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten

Cirebon Tahun 2019-2024 yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dengan tingkatan kinerja paling tinggi yaitu dampak/*impact*.

Dinas Pertanian mendukung untuk pencapaian misi ke empat yaitu **Misi “MAJU”**. Dalam dokumen Perubahan RPJMD dijelaskan misi keempat yaitu meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Misi keempat memiliki 2 (dua) tujuan dan yang berkaitan dengan sektor pertanian adalah tujuan kesatu yaitu *Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan*.

Sedangkan sasaran dimaksudkan sebagai rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* dan *impact* program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Sasaran dari tujuan pertama pada Perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 adalah :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan;
2. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat;
3. Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah;
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Mengacu pada pencapaian misi keempat “Maju” dan tujuan pertama “*Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan*” dan sasaran “*Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan*” tersebut maka Dinas Pertanian dalam mengemban kewenangannya memiliki tujuan :

“Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)”.

Pertimbangan yang digunakan sebagai dasar penentuan kontribusi PDRB menjadi tujuan atau capaian strategis tingkat kinerja pembangunan tertinggi perangkat daerah Dinas Pertanian yaitu dengan PDRB dapat menghitung pertumbuhan sektor pertanian terhadap bangkitan ekonomi di Kabupaten Cirebon. PDRB khususnya harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah

domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi disektor pertanian maka digunakan perhitungan PDRB dengan pendekatan harga konstan. Dengan mengetahui pertumbuhan PDRB di sektor pertanian maka dapat diketahui berapa besar kontribusi sektor pertanian terhadap bangkitan ekonomi di Kabupaten Cirebon.

Pada intinya kontribusi sektor pertanian akan bertambah apabila jumlah biaya produksi lebih kecil dari keuntungan yang diperoleh petani sehingga akan meningkatkan pendapatan petani. Tahun 2019 awal masa pandemi covid-19 sektor pertanian mengalami penurunan sampai pada posisi -1,05% namun pada tahun 2020 pada saat sektor lain masih terpuruk akibat pandemic covid -19, sektor pertanian dapat tumbuh, mengalami pertambahan terhadap kontribusi PDRB sebesar 2,81%. Hal ini terjadi karena meskipun pada masa pandemi covid-19 petani tetap dapat memproduksi dan memperoleh pendapatan. Seiring dengan berjalannya waktu pada tahun 2022 diharapkan kondisi akan kembali normal sehingga sektor industri dan perdagangan yang ditekuni oleh sebagian besar masyarakat di Kabupaten Cirebon akan bangkit dan akan meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB, namun kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB diprediksi tetap akan tumbuh 0,2% setiap tahunnya.

Pada awal Renstra 2019-2024 tujuan Dinas Pertanian akan diwujudkan melalui tiga sasaran yaitu meningkatkan produksi sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan terhadap PDRB, Meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok tani dan Meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Aparatur.

Namun dalam upaya untuk fokus menumbuhkan ekonomi di sektor pertanian khususnya ekonomi para petani di Kabupaten Cirebon maka Dinas Pertanian menetapkan 1 (satu) sasaran dalam perubahan Rencana Strategis tahun 2019-2024 yaitu “meningkatkan produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan)”.

Peningkatan produksi sektor pertanian tahun 2022-2024 juga akan diupayakan mendukung peningkatan 7 (tujuh) komoditas unggulan Kabupaten Cirebon yaitu beras, gula, mangga, bawang merah, cabe merah, domba dan unggas lokal. Meskipun peningkatan produksi akan terfokus pada 7 komoditas unggulan namun Dinas Pertanian tetap melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap upaya pengembangan semua komoditas pertanian yang ada di Kabupaten Cirebon.

Untuk mengukur ketercapaian sasaran maka yang menjadi indikator atau tolak ukur adalah jumlah produksi komoditas sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan. Pengukuran hanya terbatas pada produksi komoditas unggulan yaitu produksi beras, gula, bawang merah, cabe merah besar, mangga gedong gincu, daging domba dan daging unggas. Pertimbangannya karena komoditas unggulan memiliki daya dongkrak yang cukup besar terhadap perekonomian pertanian di Kabupaten Cirebon. Seperti beras yang merupakan pangan utama, termasuk komoditas strategis dan Kabupaten Cirebon termasuk sebagai salah satu kabupaten penghasil beras di Indonesia (urutan ke 25). Jumlah lahan pertanian di Kabupaten Cirebon sebagian besar adalah lahan sawah (52.579 Ha) atau 53.68% dari luas wilayah Kabupaten Cirebon (97.965 Ha) dan sampai saat ini telah mampu untuk menyediakan beras untuk beberapa kabupaten/kota di Indonesia. Demikian juga dengan komoditas bawang merah dan mangga khususnya mangga gedong gincu, produksinya di Kabupaten Cirebon telah mampu menembus pasar ekspor. Sementara produksi cabe merah besar, gula, daging domba dan daging unggas lokal jumlah produksinya sudah dapat memenuhi kebutuhan lokal.

Tabel 5.1. Target Jumlah Produksi Komoditas Sektor Pertanian Tahun 2020-2024 (Ton)

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	beras	343.107	383.240	393.174	423.877	463.689
2	gula	21.519	21.565	21.605	21.648	21.692
3	bawang merah	35.933	36.077	36.221	36.366	36.511
4	cabe merah besar	6.210	6.235	6.260	6.285	6.310
5	mangga	55.937	56.160	56.440	56.723	57.006
6	daging domba	3.969	1.623	1.649	1.675	1.702
7	daging unggas	1.803	1.786	1.813	1.840	1.868
	Jumlah	468.478	506.686	517.162	548.414	588.778

Pada aplikasi e-perencanaan target jumlah produksi komoditas unggulan tidak dapat dimunculkan satu per satu karena dalam sistem tersebut tidak dapat menampilkan beberapa data pada satu kolom sehingga untuk memudahkan penginputan maka seluruh produksi komoditas unggulan dijumlahkan menjadi satu dalam satuan ton.

Tabel 5.2

**Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kabupaten Cirebon dalam RPJMD Tahun 2019-2024**

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON YANG BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN

Misi 4: Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah										
No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi 2020	Target Kinerja				Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,86	-1,08	4,38	4,61	4,84	4,90	4,90
		Indeks Gini	Poin	0,344	0,338	0,336	0,334	0,332	0,330	0,330
		Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Juta Rupiah	10670	10342	10346	10436	10484	10510	10510
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	-1,05	1,76	3,20	3,40	3,60	3,80	3,80

Tabel 5.3

**Perubahan Indikator Tujuan dan Sasaran
Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024**

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON YANG BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN

Misi 4: Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Target				Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	
Renstra 2019-2024 (Awal)										
1	Meningkatkan Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Prosentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	10,77	10,87	11,2	11,42	11,60	11,89	11,89
	1 Meningkatkan produksi sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan	Laju produksi sektor tanaman pangan	%	0,3	1,434	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0
		Laju produksi sektor hortikultura (manga, bawang merah, cabe merah)	%	0,4	0,487	0,4	0,4	0,4	0,4	2,0
		Laju produksi sektor perkebunan (gula dan kelapa)	%	0,6	0,444	0,6	0,6	0,6	0,6	3,0
		Laju produksi sektor peternakan (sapi potong, ayam ras, unggas lokal, domba)	%	1,0	1,725	1,7	1,7	1,7	1,7	8,5
	2 Meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok tani	Prosentase kelas kelompok petani utama dan madya	%	4,42	5,71	4,69	4,82	4,93	5,06	5,06
	3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) SKPD	%	75,86	82,88	80	82	84	85	85

Renstra 2019-2024 (Perubahan)										
1	Meningkatkan Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	Persen	-1,05	1,76	1,86	2,08	2,31	2,54	2,54
	1 Meningkatkan produksinya sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan)	Jumlah produksi komoditas tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan	Ton	468.478	508.903	506.686	517.162	548.414	588.788	588.788

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perubahan rencana strategis Dinas Pertanian periode 2019-2024 disusun berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjabarkan dukungan terhadap visi dan misi kepala daerah terpilih periode 2019-2024 dengan berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon 2005-2025.

5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon

Strategi disusun untuk mencapai sasaran strategis pembangunan. Setiap strategi harus mampu diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan yang dituju dan mendukung pencapaian misi yang telah ditetapkan. Strategi merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien.

Salah satu metode untuk menentukan strategi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah penggunaan analisis SWOT. Metode ini digunakan karena lebih sederhana dan banyak dipahami oleh *stakeholders* pembangunan termasuk di Kabupaten Cirebon. Analisis SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*) dilakukan terlebih dahulu agar penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inheren. Input utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya. Isu-isu strategis tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam faktor internal atau eksternal.

TABEL.5.1 ANALISIS TERHADAP PELUANG DAN TANTANGAN KINERJA DINAS PERTANIAN

FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEEKNESS)
	Luas lahan pertanian di Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 mencapai 52.579 Ha atau 53.68% dari luas wilayah Kabupaten Cirebon (97.965 Ha)	Belum adanya Peraturan Daerah yang melindungi lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B)
	Sumberdaya manusia tersedia dalam jumlah yang cukup (11% masyarakat Kabupaten Cirebon menekuni sektor pertanian)	Kelembagaan petani dan posisi tawar petani rendah.
	Memiliki potensi untuk pengembangan beragam komoditas pertanian (beras, gula, mangga, cabe merah, bawang merah, domba, unggas lokal)	Sistem diseminasi teknologi tidak fokus (terhadap komoditas unggulan)
	Ketersediaan jaringan irigasi sepanjang 1.169 km	Jaringan irigasi yang ada belum berfungsi optimal (banyak saluran mengalami pendangkalan, kerusakan bangunan irigasi dan jaringan irigasi terputus
FAKTOR EKSTERNAL	Meningkatnya kebutuhan daging untuk memenuhi wisata kuliner	Kebutuhan ternak potong masih dipenuhi dari luar Kabupaten Cirebon
PELUANG (OPPORTUNITY)	S-O (I)	W-O (II)
Meningkatnya kebutuhan bahan pangan untuk konsumsi dan penyediaan bahan baku industri;	Peningkatan indeks pertanaman (PIP)	Mendorong rehabilitasi jaringan irigasi tersier
Daya dukung kondisi agroklimat di Kabupaten Cirebon mendukung pengembangan sektor pertanian	Pengembangan sumber daya genetik hewan dan tanaman komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Cirebon	Subsidi benih unggul untuk petani di wilayah LP2B
		Revitalisasi mangga gedong gincu
		Melakukan pengembangan perbibitan ternak dan optimalisasi inseminasi buatan
Meningkatnya pemahaman dan permintaan terhadap green product (produk pertanian ramah lingkungan)	Peningkatan kuantitas dan kualitas produk hasil pertanian yang ramah lingkungan	Meningkatkan frekuensi penyuluhan mendukung pertanian ramah lingkungan
Tumbuhnya dukungan dari lembaga-lembaga penyandang dana melalui pola kemitraan usaha	Memperkuat kerjasama dengan balai penelitian serta pihak akademisi	Melakukan kajian yang berkaitan dengan sektor pertanian
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi	Mendorong upaya transfer iptek menuju pertanian terpadu dan berkelanjutan	Membangun sistem pertanian berbasis teknologi informasi
		Menyiapkan generasi milenial sebagai kader petani milenial
ANCAMAN (THREATH)	S-T (III)	W-T (IV)
Kabupaten Cirebon tidak memiliki sumber air	Meningkatkan koordinasi pemanfaatan sumber-sumber air lintas kabupaten	Meningkatkan koordinasi untuk perbaikan/rehabilitasi/ sodetan aliran air/pengerukan sungai dan saluran irigasi untuk berfungsi optimal
		Menyiapkan long storage, dam parit dan embung sebagai tandon air
Terjadi kekeringan pada musim kemarau dan banjir menggenangi areal pertanian pada musim hujan;	Mendorong penggunaan benih varietas berumur pendek dan tahan terhadap banjir dan kekeringan	Menyiapkan subsidi premi asuransi usaha tani padi (AUTP) untuk Petani di wilayah LP2B
		Menyiapkan demplot untuk menghasilkan bibit unggul tahan banjir
Rantai tataniaga yang panjang dan sistem pemasaran yang belum terjangkau;	Menguatkan koordinasi dengan perangkat daerah yang terkait dengan sektor pertanian untuk menyusun dan menerbitkan regulasi pendukung dalam sistem pemasaran hasil pertanian dan mendukung ketahanan pangan	Menyiapkan peraturan daerah dan kepala daerah untuk mendukung sektor pertanian
Rendahnya penjaminan keamanan dan mutu pangan	Meningkatkan pengawasan peredaran hew an/tanaman dan bahan asal hew an/ tanaman	Meningkatkan penerapan praktik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan secara baik (Good Agriculture Practices, Good Handling Practices dan Good Manufacturing Practices)

Berdasarkan identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal di atas, dirumuskan strategi-strategi yang terbagi ke dalam empat kuadran. Kuadran I adalah strategi S-O yang merupakan strategi untuk menggunakan kekuatan atau *strength* (S) untuk memanfaatkan kesempatan atau *opportunities* (O). Kuadran II adalah strategi W-O yang merupakan strategi untuk meminimalkan kelemahan atau *weakness* (W) dengan memanfaatkan kesempatan atau *opportunities* (O). Kuadran III adalah strategi S-T yang merupakan strategi untuk menggunakan kekuatan atau *strength* (S) guna menjawab tantangan *threats* (T) yang dihadapi. Sedangkan, Kuadran IV adalah strategi W-T yang merupakan strategi untuk meminimalkan kelemahan atau *weakness* (W) dengan menjawab tantangan *threats* (T) yang dihadapi.

Berdasarkan analisis di atas, rumusan perubahan strategi Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon untuk periode pembangunan 2019-2024 berjumlah 9 (sembilan) strategi, secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan indeks pertanaman (PIP);
2. Pengembangan sumber daya genetik hewan dan tanaman komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Cirebon;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk hasil pertanian yang ramah lingkungan;
4. Memperkuat kerjasama dengan balai penelitian serta pihak akademisi;
5. Mendorong upaya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi menuju pertanian terpadu.
6. Meningkatkan koordinasi pemanfaatan sumber-sumber air lintas kabupaten;
7. Mendorong penggunaan benih varietas berumur pendek dan tahan terhadap banjir dan kekeringan;
8. Memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah yang terkait dengan sektor pertanian untuk menyusun dan menerbitkan regulasi pendukung dalam sistem pemasaran hasil pertanian dan mendukung ketahanan pangan;
9. Meningkatkan pengawasan peredaran hewan/tanaman dan bahan asal hewan/ tanaman.

5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Pertanian

Arah kebijakan merupakan usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang konkret untuk memberikan arahan dan panduan

kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tema tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap untuk penyusunan dokumen Renstra.

Penyusunan arah kebijakan mempertimbangkan urgensi suatu permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan untuk menentukan tahapan dan prioritas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan berfungsi untuk menyelaraskan strategi-strategi pembangunan daerah dan dokumen perencanaan lainnya sehingga didapatkan langkah-langkah pencapaian tujuan sasaran yang saling bersinergi untuk mencapai tujuan dan sasaran untuk lima tahun ke depan.

Berdasarkan analisis SWOT, arah kebijakan pembangunan pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Mendorong rehabilitasi jaringan irigasi tersier;
2. Subsidi benih unggul untuk petani di wilayah LP2B
3. Revitalisasi mangga gedong gincu;
4. Melakukan pengembangan perbibitan ternak dan optimalisasi inseminasi buatan;
5. Meningkatkan frekuensi penyuluhan mendukung pertanian ramah lingkungan;
6. Melakukan kajian yang berkaitan dengan sektor pertanian;
7. Membangun sistem pertanian berbasis teknologi informasi.
8. Menyiapkan generasi milenial sebagai kader petani milenial;
9. Meningkatkan koordinasi untuk perbaikan/rehabilitasi/ sodetan aliran air/pengerukan sungai dan saluran irigasi untuk berfungsi optimal;
10. Menyiapkan embung sebagai tandon air di saat musim penghujan;
11. Menyiapkan subsidi premi asuransi usaha tani padi (AUTP) untuk Petani di wilayah LP2B;
12. Menyiapkan demplot untuk menyediakan benih unggul tahan banjir dan kekeringan;
13. Menyiapkan peraturan daerah dan kepala daerah untuk mendorong pengembangan sektor pertanian;
14. Meningkatkan penerapan praktik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan secara baik (Good Agriculture Practices, Good Handling Practices dan Good Manufacturing Practices).

TABEL.5.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN			
VISI	TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON YANG BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN		
MISI 4	Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah		
TUJUAN	Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB		
SASARAN	Meningkatnya produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan)		
NO	STRATEGI	NO	ARAH KEBIJAKAN
1	Peningkatan indeks pertanaman (PIP)	1	Mendorong rehabilitasi jaringan irigasi tersier
2	Pengembangan sumber daya genetik hewan dan tanaman komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Cirebon	2.1	Subsidi benih unggul untuk petani di wilayah LP2B
		2.2	Revitalisasi mangga gedong gincu
		2.3	Melakukan pengembangan perbibitan ternak dan optimalisasi inseminasi buatan
3	Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk hasil pertanian yang ramah lingkungan	3	Meningkatkan frekuensi penyuluhan mendukung pertanian ramah lingkungan
4	Memperkuat kerjasama dengan balai penelitian serta pihak akademisi	4	Melaksanakan kajian yang berkaitan dengan sektor pertanian
5	Mendorong upaya transfer iptek menuju pertanian terpadu dan berkelanjutan	5.1	Membangun sistem pertanian berbasis teknologi informasi
		5.2	Menyiapkan generasi milenial sebagai kader petani milenial
6	Meningkatkan koordinasi pemanfaatan sumber-sumber air lintas kabupaten	6.1	Meningkatkan koordinasi untuk perbaikan/rehabilitasi/ sodetan aliran air/pengerukan sungai dan saluran irigasi untuk berfungsi optimal
		6.2	Menyiapkan embung, long storage dan dam parit sebagai tandon air
7	Mendorong penggunaan benih varietas berumur pendek dan tahan terhadap banjir dan kekeringan	7.1	Menyiapkan subsidi premi asuransi usaha tani padi (AUTP) untuk Petani di wilayah LP2B
		7.2	Menyiapkan demplot untuk menyediakan benih unggul tahan banjir dan kekeringan
8	Menguatkan koordinasi dengan perangkat daerah yang terkait dengan sektor pertanian untuk menyusun dan menerbitkan regulasi pendukung dalam sistem pemasaran hasil pertanian dan mendukung ketahanan pangan	8	Menyiapkan peraturan daerah dan kepala daerah untuk mendorong pengembangan sektor pertanian
9	Meningkatkan pengawasan peredaran hewan/tanaman dan bahan asal hewan/tanaman	9	Meningkatkan penerapan praktik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan secara baik (Good Agriculture Practices, Good Handling Practices dan Good Manufacturing Practices)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, maka akan dilaksanakan program-program yang mendukung pembangunan pertanian. Kerangka penyusunan pembangunan pertanian mulai tahun 2021 telah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah yang menjadi dasar perangkat daerah untuk menyusun Renstra maka program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi, misi, dan prioritas pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
2. Berbasis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah;
3. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs);
4. Penerapan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Program perangkat daerah merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, serta unsur penunjang. Program-program yang disusun pada Renstra 2019-2024 dengan perubahan Renstra 2019-2024 ada perbedaan karena adanya perbedaan nomenklatur program diantara periode tahun tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Program tahun 2020 merupakan program berdasarkan proses penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, dengan nomenklatur berdasarkan Permendagri nomor 58 tahun 2005;
2. Program tahun 2021 disusun berdasarkan hasil mapping Renstra 2019-2024 terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Penerapan peraturan ini menyebabkan perencanaan pembangunan daerah yang semula hanya program dan kegiatan, maka setelah penerapan aturan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan. Perbedaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur ini menyebabkan penyesuaian indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan, dengan mengutamakan penggunaan indikator kinerja pada tahun sebelumnya. Penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerjanya dimuat pada Renstra Perangkat Daerah.

3. Program-program tahun 2022-2024 disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Pada Renstra awal 2019-2024 ada 7 program urusan pertanian yang dilaksanakan meliputi 30 kegiatan dan 5 Program non urusan yang meliputi 22 kegiatan, sebagai berikut:

I. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

1. Penyediaan sarana produksi pertanian
2. Penyusunan dan pendataan potensi pertanian
3. Monitoring evaluasi dan pelaporan statistik pertanian
4. Penanganan panen dan pengamanan hasil pertanian
5. Pengembangan benih/bibit unggul pertanian
6. Pengembangan infrastruktur pertanian
7. Penyediaan sarana dan prasarana hortikultura
8. Peningkatan produksi buah dan florikultura
9. Peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat
10. Sertifikasi lahan usaha/kebun hortikultura
11. Pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
12. Penyediaan sarana dan prasarana produksi perkebunan
13. Peningkatan produksi dan mutu komoditas tanaman semusim
14. Penyusunan dokumen kebijakan dan koordinasi teknis pengembangan tebu rakyat
15. Pengembangan tanaman rempah, penyegar dan tahunan

II. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

1. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

2. Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

III. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

1. Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
2. Pembibitan dan perawatan ternak
3. Pengembangan unggas lokal dan aneka ternak
4. Pengembangan ternak ruminansia
5. Pengembangan pelayanan rumah potong hewan

IV. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

1. Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna
2. Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna

V. Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

1. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
2. Pengawasan perdagangan ternak antar daerah

VI. Program Peningkatan Kemampuan Kelompok Tani

1. Pelatihan budidaya, pengolahan hasil dan pemasaran
2. Penyuluhan dan fasilitasi petani dan pelaku agrobisnis
3. Pelatihan kelembagaan kelompok tani

VII. Program Peningkatan Kemampuan Kelompok Tani

1. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

VIII. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
3. Penyediaan alat tulis kantor
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
6. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8. Penyediaan makanan dan minuman
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

IX. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pembangunan gedung kantor
2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
3. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

7. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

X. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

XI. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

XII. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral.

1. Penyusunan dokumen perencanaan sektoral-rencana jangka menengah

Sementara pada perubahan Renstra Dinas Pertanian Tahun 2019-2024 terdapat 7 (tujuh) program yang disiapkan untuk mendukung upaya pencapaian peningkatan produksi hasil pertanian di Kabupaten Cirebon. Program-program tersebut adalah :

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
3. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesmavet;
4. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
5. Program perizinan usaha pertanian;
6. Program penyuluhan pertanian; dan
7. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota.

Dari ketujuh program tersebut ada tiga program yang menjadi program strategis untuk tahun 2022-2024 diantaranya adalah :

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
3. Program penyuluhan pertanian.

Ketiga program tersebut memuat kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2022-2024 yaitu :

- a. Penyediaan Bibit Unggul Bersertifikat (Sebagai Insentif LP2B)
- b. Asuransi Usaha Tani Padi (Sebagai Insentif LP2B)
- c. Jalan Usaha Tani (Inventarisasi)
- d. Revitalisasi Jaringan Irigasi Tersier
- e. Revitalisasi Mangga Gedong Gincu (diintervensi kementerian dengan dana upland untuk peningkatan produktivitas dan nilai tambah)
- f. Pengembangan demplot (memberikan contoh konkrit petani dg penerapan teknologi dan inovasi beberapa komoditi sektor pertanian).

Tabel 6.1. Indikator Program Pada Perubahan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

NO.	PROGRAM/ INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			
			2021	2022	2023	2024
1	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
	Rasio ketersediaan sarana produksi pertanian	$\frac{\text{SARANA YANG TERSEDIA PADA TAHUN } n}{\text{SARANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MNDUKUNG TARGET PRODUKSI TAHUN } n}$	0,48	0,52	0,53	0,54
2	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
	Rasio ketersediaan prasarana produksi pertanian	$\frac{\text{PRASARANA YANG TERSEDIA PADA TAHUN } n}{\text{PRASARANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MNDUKUNG TARGET PRODUKSI TAHUN } n}$	0,14	0,21	0,26	0,30
3	PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
	Penurunan kejadian/ jumlah kasus penyakit hewan menular	JUMLAH KEJADIAN PENYAKIT ZONOSIS TAHUN n DIKURANGI JUMLAH KEJADIAN PENYAKIT ZONOSIS TAHUN n-1DALAM SATUAN TERNAK	2	6	6	6
4	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
	Rasio tingkat keberhasilan penanggulangan bencana pertanian per tahun	$\frac{\text{LUAS LAHAN TERTANGGULANGI PADA TAHUN } n}{\text{LUAS LAHAN TERDAMPAKBENCANA PERTANIAN PADA TAHUN } n}$	0,56	0,56	0,58	0,60
5	PERIZINAN USAHA PERTANIAN					
	Rasio usulan izin usaha pertanian	$\frac{\text{PELAYANAN YANG ADA DI BIDANG BERKAITAN DENGAN KOMODTAS UNGGULAN}}{\text{PELAYANAN YANG HARUS ADA DI BIDANG BERKAITAN DENGAN KOMODTAS UNGGULAN}}$	0,80	0,81	0,82	0,83
6	PENYULUHAN PERTANIAN					
	persentase kelompok petani yang naik kelas	PERSENTASE KELAS KELOMPOK PETANI UTAMA DAN MADYA	10	10	10	10
7	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT	82	83	84	85

Dalam menentukan indikator program, pada program penyediaan dan pengembangan sarana, penyediaan dan pengembangan prasarana, program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian serta program perizinan usaha pertanian dilakukan dengan perhitungan rasio. Untuk terwujud kondisi ideal yang diharapkan, maka nilai rasio adalah 1 dimana terjadi keseimbangan antara unsur pendukung yang tersedia terhadap yang dibutuhkan namun untuk mewujudkan hal tersebut masih membutuhkan waktu dan kerja keras seluruh stake holder pertanian. Unsur pendukung yang dibutuhkan dihitung untuk mewujudkan target sementara unsur pendukung yang tersedia dihitung dari kondisi akhir pada tahun sebelumnya.

Hasil mapping program dan kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 tahun 2019 pada Dinas Pertanian ada 7 (tujuh) program, 19 kegiatan dan 56 sub kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 6.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Perubahan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	1.Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
			2.Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
		2.Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan kab/ kota	3.Penjaminan kemurnian SDG hewan/ tanaman
			4.Peningkatan kualitas SDG Hewan/ Tanaman
			5.Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman
		3.Peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan	6.Pengawasan mutu benih/ bibit ternak, bahan pakan/ pakan/ tanaman skala kecil

		dalam daerah Kabupaten/ Kota	
NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		4.Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/ bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah Kabupaten/ Kota	7.Penjaminan peredaran benih/bibit ternak
		5.Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	8.Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
2.	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	6.Pengembangan Prasarana Pertanian	9.Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B
			10.Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B
			11.Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
		7.Pembangunan Prasarana Pertanian	12.Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
			13.Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
			14.Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
			15.Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit

			16.Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage
NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			17.Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
			18.Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya
			19.Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
3.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	8.Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
		9.Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	21.Pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan
			22.Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
4.	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	10.Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	23.Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
			24.Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) TP, Hortikultura, dan Perkebunan
5.	Program perizinan usaha pertanian	11.Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian

			26.Penyusunan standar pelayanan publik pemberi izin usaha pertanian
			27.Pembinaan pengawasan penerapan izin usaha pertanian
NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
6.	Program Penyuluhan Pertanian	12. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	28.Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
			29.Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
			30.Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			32.Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD
			33.Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD
			34.Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			35.Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
			36.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			37.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		14.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			39.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

			40.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
			41.Pengamanan barang milik daerah SKPD
NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		15.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		16.Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			44.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			45.Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			46.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			47.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			48.Penyediaan Bahan/Material
			49.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		17.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		18.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		19.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			53.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			54.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

			55.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			56.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6.2 Rencana Pendanaan Indikatif

Pembangunan pertanian sektor pertanian di Kabupaten Cirebon bertujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Untuk mewujudkannya pemerintah memfasilitasi secara serius terhadap partisipasi masyarakat dengan mendayagunakan keterpaduaan program/kegiatan yang dibiayai oleh APBN, APBD Prov, APBD dan sumber-sumber dana pembangunan lainnya.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan maka perlu adanya dukungan pendanaan untuk dapat melaksanakan program/kegiatan yang dilakukan oleh perangkat kerja termasuk Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon guna tercapainya tujuan pembangunan selama kurun waktu lima tahun, 2019–2024. Rencana Pendanaan Indikatif Program/Kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

BAB VII

INDIKATOR KINERJA SKPD

7.1 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang terdiri atas:

- a. capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan aturan tersebut

pada ayat (3) selanjutnya disebutkan Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. capaian kinerja makro;
- b. capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan
- c. capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

Pada pasal 25 ayat (4) disebutkan bahwa penilaian IKK dilakukan berdasarkan bobot nilai per bidang urusan pemerintahan dan bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang urusan pemerintahan, selanjutnya pada ayat (6) disebutkan bahwa Uraian indikator dan bobot nilai untuk indikator kinerja makro dan IKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data atau informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data atau informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap. Indikator kinerja kunci terdiri dari:

- a. indikator kinerja kunci keluaran;
- b. indikator kinerja kunci hasil; dan
- c. indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Cirebon periode 2019-2024 dapat tergambar dari capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari indikator kinerja makro dan indikator kinerja urusan pemerintahan daerah. Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon memiliki kewajiban untuk mendukung pencapaian indikator kinerja kunci menurut bidang urusan pilihan (pertanian) dengan indikator kinerja kunci keluaran dan indikator kinerja kunci hasil sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2020. Selengkapnya ditampilkan dalam tabel 7.1.

Indikator Kinerja daerah (IKD) merupakan bagian dari data atau informasi untuk mencapai indikator kinerja kunci (IKK). IKD dicapai dengan dukungan pencapaian kinerja perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019– 2024

ASPEK/ URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR IKK OUTCOME	INDIKATOR IKK OUTPUT	FORMULASI	SATUAN	KONDISI AWAL	KINERJA TAHUN					KONDISI AKHIR
						2020	2021	2022	2023	2024	
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (padi)		Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun ----- luas panen	Kw/Ha	63,25	63,3	65,7	66	67	68	68
		Sarana pertanian yang diberikan (benih)	Jumlah Sarana pertanian yang diberikan	Kg		347.575	191.250	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Prasarana pertanian yang digunakan (jides)	Jumlah Prasarana pertanian yang digunakan	Unit	18	30	20	188	188	188	188
		Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah Penerbitan izin usaha pertanian ----- x 100% Jumlah usulan izin usaha pertanian	Persen	0	0	100	100	100	100	100
		Persentase prasarana yang digunakan	Jumlah prasarana yang digunakan ----- x 100% Jumlah seluruh prasarana	Persen	0	0	38	41	43	45	45
Perizinan Usaha Pertanian		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	Jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota ----- x 100% Jumlah seluruh usaha pertanian di kab/kota	Persen	0	0	80	80	80	80	80
Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular		Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun "Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) -----x 100% Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	Persen	2	2	2	6	6	6	20
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah fasilitasi penanggulangan bencana ----- x 100% Jumlah seluruh fasilitasi pertanian di kab/kota	Persen	0	0	50	53	55	56	56

7.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon

Pencapaian kinerja Perangkat Daerah digambarkan menggunakan indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang memuat indikator kinerja sasaran dari perencanaan strategis (Renstra) perangkat daerah. IKU perangkat daerah dicapai dengan dukungan pencapaian kinerja program. Perangkat daerah Dinas Pertanian menjadikan produksi sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan sebagai indikator kinerja utama (IKU) mengingat sampai saat ini produksi pada sektor pertanian secara umum masih rendah sehingga hal ini menjadi permasalahan pokok pada sektor pertanian. IKU Dinas Pertanian seperti tertuang pada tabel 7.2

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja Utama	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Realisasi 2020	Target				Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan)	Ton	486.306	508.903	506.686	517.162	548.414	588.788	588.788

Agar produksi komoditas unggulan dapat terwujud seperti yang diharapkan maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya adalah luas tanam yang kaitannya dengan ketersediaan lahan-lahan pertanian dan luas panen yang kaitannya dengan sarana dan prasarana yang tersedia sebagai penunjang produksi. Untuk menjaga luas tanam sesuai dengan target maka perlu dilakukan upaya pengawasan agar lahan-lahan pertanian tersebut jumlahnya tidak berkurang, selain itu perlu dukungan dan perhatian pemerintah daerah terhadap petani yang berada di wilayah lahan pertanian. Sementara agar target luas panen dapat terwujud maka perlu dilakukan intervensi terhadap penyediaan sarana produksi yang sesuai, perbaikan sistem pengelolaan prasarana, serta perlindungan terhadap sumber daya genetik agar kelestarian lingkungan tetap terjaga.

Pada kondisi ideal dimana semua kebutuhan sarana dan prasarana produksi dapat terpenuhi maka hasil produksi akan mencapai target sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2024, namun pada saat kondisi ideal tidak dapat tercapai maka Dinas Pertanian telah menghitung kemampuan produksi komoditas unggulan untuk periode tahun 2022-2024 dengan berpedoman pada potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia pada saat ini.

Tabel 7.3. Realisasi dan Target Produksi Komoditas Unggulan Tahun 2020-2024					
URAIAN	Padi				
	Realisasi	Target			
	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Tanam (Ha)	90.778	94.778	96.793	102.794	110.795
Luas Panen (Ha) (96% LT)	90.571	90.987	92.921	98.682	106.363
Produktivitas (Ton/Ha)	6,40	6,57	6,60	6,70	6,80
Produksi GKG (Ton)	581.395	597.785	613.280	661.171	723.271
Produksi Beras (Ton) (64,11% GKG)	372.732	383.240	393.174	423.877	463.689
	Gula				
	Realisasi	Target			
	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Tanam Tebu (Ha)	3.466	4.787	4.844	4.903	4.961
Produktivitas Gula (Ton/Ha)	4,55	4,5	4,46	4,42	4,37
Produksi Gula (Ton)	15.772	21.562	21.605	21.648	21.692
	Mangga				
	Realisasi	Target			
	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Tanam (Ha)		10.958	11.178	11.568	11.973
Produktivitas (Ton/Ha)		5,13	5,13	5,13	5,13
Produksi (Ton)	53.625	56.160	57.288	59.288	61.363
	Bawang Merah				
	Realisasi	Target			
	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Tanam (Ha)	3.441	3.663	3.678	3.692	3.707
Produktivitas (Ton/Ha)	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85
Produksi (Ton)	34.636	36.076	36.221	36.367	36.511
Kebutuhan Benih per-Ha (Ton)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Total Kebutuhan Benih (Ton)	5.162	5.494	5.516	5.539	5.561
	Cabai Besar				
	Realisasi	Target			
	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Tanam (Ha)	698	698	701	704	707
Produktivitas (Ton/Ha)	8,85	8,93	8,93	8,93	8,93
Produksi (Ton)	6.159	6.235	6.260	6.285	6.310
Kebutuhan Benih per-Ha (kg)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Total Kebutuhan Benih (kg)	209,4	210	210	211	212

Tabel 7.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Pertanian yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

No.	Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi 2020	Target				Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Prosen	4,86	-1,08	4,38	4,61	4,84	4,90	4,90
		Indeks Gini	Poin	0,344	0,338	0,336	0,334	0,332	0,330	0,330
		Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Juta Rupiah	10670	10342	10346	10436	10484	10510	10510
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Prosen	-1,05	1,76	3,20	3,40	3,60	3,80	3,80
No.	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Realisasi 2020	Target				Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatkan Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	Prosen	-1,05	1,76	1,86	2,08	2,31	2,54	2,54
1	Meningkatnya produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan)	Jumlah produksi komoditas tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan	Ton	486.306	508.903	506.686	517.162	548.414	588.788	588.788

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 telah disusun dengan berpedoman pada perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan dokumen perencanaan terkait lainnya diantaranya Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2020-2024, Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat 2018-2023, Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat 2018-2023, dan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat 2018-2023.

Beranjak dari kondisi masih rendahnya kontribusi PDRB sektor pertanian di Kabupaten Cirebon, maka pembangunan di bidang pertanian pada tahun 2019-2024 diprioritaskan pada upaya peningkatan produksi hasil pertanian khususnya komoditas unggulan di Kabupaten Cirebon yaitu beras, mangga, cabe merah, bawang merah, daging domba dan unggas lokal. Upaya ini mendapat dukungan sepenuhnya dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui pelaksanaan proyek-proyek strategis yang diterjemahkan ke dalam program-program unggulan. Hal ini diharapkan dapat menjawab semua permasalahan yang menjadi penyebab rendahnya produksi hasil pertanian di Kabupaten Cirebon.

Proyek-proyek strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian pada tahun 2022-2024 adalah insentif benih padi unggul, revitalisasi jaringan irigasi tersier, subsidi premi asuransi usaha tanaman padi (AUTP), inventarisasi jalan usaha tani (JUT), revitalisasi mangga gedong gincu dan pembangunan rumah potong hewan (RPH) dan pembangunan demplot. Proyek-proyek strategis tersebut tertuang pada program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian serta program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dan program penyuluhan pertanian

Selain itu untuk mendukung pencapaian misi Bupati Cirebon Periode 2019-2024 khususnya misi “MAJU” maka dilaksanakan juga program-program unggulan lainnya yaitu program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, program perizinan usaha pertanian, dan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

Diharapkan perubahan rencana strategis Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon ini mampu menjawab isu strategis dan permasalahan pokok dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

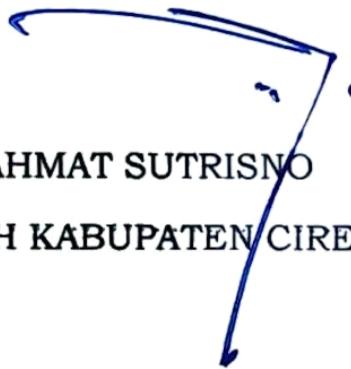
BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 27 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR



**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PERIODE 2019-2024
DINAS PERTANIAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB				Prosentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	10,77 Prosen	10,98	69.686.502.892	11,2	101.609.953.926	0	0	0	0	0	0	11,2	171.296.456.818		
	Meningkatnya Produksi Sektor Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura dan Peternakan terhadap PDRB			Laju Produksi Sektor Tanaman Pangan (Beras)	0,3 Persen	1	1.621.647.000	1	4.683.722.680	0	0	0	0	0	0	2	6.305.369.680		
	02.		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan (Beras)	340.309 Ton	343.107	288.447.000	347.493	944.100.000	0	0	0	0	0	0	347.493	1.232.547.000		
				Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar	63,25 Kwintal/Ha	63,3	15.000.000	63,35	15.000.000	0	0	0	0	0	0	63,35	30.000.000		
		02.2.01.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	0 BA	0	0	1	959.100.000	0	0	0	0	0	0	1	959.100.000		
				Jumlah sarana pertanian (Pupuk, Pestisida, alsintan) yang terawasi peredarannya dan mutu penggunaannya	0 Jenis	0	0	3	959.100.000	3	0	3	0	3	0	12	959.100.000		
		02.2.01.01.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terlaksananya Pertemuan Teknis Pembinaan Pengolahan Produksi Aneka Kacang dan Umbi	10 Kali	10	283.447.000	10	939.100.000	0	0	0	0	0	0	20	1.222.547.000	BIDANG TANAMAN PANGAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian (Pompa Air)	4 Unit	3	5.000.000	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	4	10.000.000		
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian (Hand Sprayer Elektrik)	49 Unit	53	5.000.000	53	5.000.000	0	0	0	0	0	0	106	10.000.000		
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian (Traktor)	0 Unit	3	5.000.000	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	4	10.000.000		
				Tersedianya Alat Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Panen: Power Thresher	6 Unit	8	5.000.000	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	9	10.000.000		
		03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan (Beras)	340.309 Ton	343.107	434.000.000	347.493	3.174.622.680	0	0	0	0	0	0	347.493	3.608.622.680		
		03.2.01.	Pengembangan Prasarana Pertanian	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	0 BA	0	0	1	788.782.680	0	0	0	0	0	0	1	788.782.680		
				Jumlah Prasarana Pertanian yang Difasilitasi	0 Jenis	0	0	12	788.782.680	12	0	12	0	12	0	12	788.782.680		
		03.2.01.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Tersusunnya data base potensi produksi pertanian	0 Dok	0	0	2	121.836.200	0	0	0	0	0	0	2	121.836.200	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Tersusunnya Database Potensi Produksi Pertanian	2 Dok	2	424.000.000	2	656.946.480	0	0	0	0	0	0	4	1.080.946.480	BIDANG TANAMAN PANGAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Laju Alih Fungsi Lahan	0,5 %	0,02	5.000.000	0,02	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0,04	10.000.000		
				Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Statistik Pertanian	1 Dok	1	5.000.000	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	2	10.000.000		
		03.2.02.	Pembangunan Prasarana Pertanian	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	0 BA	0	0	1	2.385.840.000	0	0	0	0	0	0	1	2.385.840.000		
				Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun/direhab	0 Unit	0	0	4	2.385.840.000	339	0	359	0	415	0	1.117	2.385.840.000		
		03.2.02.03.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terlaksananya Pembangunan Jalan Usaha Tani	0 Paket	0	0	4	1.588.840.000	0	0	0	0	0	0	4	1.588.840.000	BIDANG TANAMAN PANGAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Terlaksananya Pembangunan Jalan Produksi	0 Paket	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	1	5.000.000		
		03.2.02.04.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah dam parit yang dibangun	0 unit	0	0	4	528.000.000	0	0	0	0	0	0	4	528.000.000	BIDANG TANAMAN PANGAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
		03.2.02.05.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah long storage yang dibangun	0 unit	0	0	2	264.000.000	0	0	0	0	0	0	2	264.000.000	BIDANG TANAMAN PANGAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
		05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan (Beras)	340.309 Ton	343.107	879.200.000	347.493	545.000.000	0	0	0	0	0	0	347.493	1.424.200.000		
		05.2.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	0 BA	0	0	1	545.000.000	0	0	0	0	0	0	1	545.000.000		
				Jumlah wilayah yang mendapat fasilitasi penanggulangan bencana	0 Ha	0	0	3.615	545.000.000	3.787	0	3.959	0	4.132	0	15.493	545.000.000		
		05.2.01.01.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Gropyokan Tikus	9 Kecamatan	8	740.000.000	1	350.000.000	0	0	0	0	0	0	9	1.090.000.000	BIDANG TANAMAN PANGAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Tersedianya Sarana Produksi Pertanian Pestisida Penggerek Batang	228 Liter	360	5.000.000	360	5.000.000	0	0	0	0	0	0	720	10.000.000		
				Tersedianya Sarana Produksi Pertanian Pestisida Wereng Batang Coklat	228 Liter	360	5.000.000	230	5.000.000	0	0	0	0	0	0	590	10.000.000		
				Tersedianya Sarana Produksi Pertanian Pestisida Kresek	110 Liter	110	5.000.000	110	5.000.000	0	0	0	0	0	0	220	10.000.000		
		05.2.01.02.	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Sekolah Lapang Iklim	0 Kelompok	40	119.200.000	25	175.000.000	0	0	0	0	0	0	65	294.200.000	BIDANG TANAMAN PANGAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Terlaksananya Penangkaran benih dan Ketersediaan benih padi bermutu yang dihasilkan	34.000 Kg	35.000	5.000.000	35.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	70.000	10.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar	63,25 Kwintal/Ha	63,3	5.000.000	63,35	5.000.000	0	0	0	0	0	0	63,35	10.000.000		
		07.2.01.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	0 BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Jumlah Kelompok Tani yang Naik kelas	0 Kelompok Tani	0	0	160	5.000.000	157	0	154	0	151	0	622	5.000.000		
		07.2.01.03.	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelayanan klinik agribisnis	0 kali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG PENYULUHAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Statistik Pertanian	0 Dok	1	5.000.000	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	2	10.000.000		
	Meningkatnya Produksi Sektor Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura dan Peternakan terhadap PDRB			Laju Produksi Sektor Hortikultura (Bawang Merah, Cabai Besar dan Mangga)	0,4 Prosen	0,4	5.407.500.000	0,4	5.278.000.000	0	0	0	0	0	0	0,8	10.685.500.000		
		02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Komoditas Hortikultura (Bawang Merah, Cabai Besar dan Mangga)	97.300 ton	98.080	2.652.000.000	98.472	90.000.000	0	0	0	0	0	0	196.552	2.742.000.000		
		02.2.03.	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 BA	0	0	1	90.000.000	0	0	0	0	0	0	1	90.000.000		
				Jumlah bibit ternak bermutu yang digulirkan kepada masyarakat	0 Satuan Ternak	0	0	2	90.000.000	12	0	12	0	12	0	38	90.000.000		
		02.2.03.01.	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Tersedianya bibit tanaman buah-buahan dan toga	2.832 Pohon	1.280	2.652.000.000	1.400	90.000.000	0	0	0	0	0	0	2.680	2.742.000.000	BIDANG HORTIKULTURA	Kab. Cirebon
		03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Komoditas Hortikultura (Bawang Merah, Cabai Besar dan Mangga)	97.300 Ton	98.080	2.662.000.000	98.472	4.893.000.000	0	0	0	0	0	0	196.552	7.555.000.000		
		03.2.02.	Pembangunan Prasarana Pertanian	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	0 BA	0	0	1	4.893.000.000	0	0	0	0	0	0	1	4.893.000.000		
				Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun/direhab	0 Unit	0	0	4	4.893.000.000	339	0	359	0	415	0	1.117	4.893.000.000		
		03.2.02.01.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jalan Produksi Hortikultura	0 Meter	2.000	152.000.000	2.000	1.188.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000	1.340.000.000	BIDANG HORTIKULTURA	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Pembangunan Sumber Air Tanah Dalam	0 unit	10	5.000.000	10	855.000.000	0	0	0	0	0	0	20	860.000.000		
				Pembangunan Sumur Air Tanah Dangkal/Sumur Pantek	0 unit	20	5.000.000	20	2.850.000.000	0	0	0	0	0	0	40	2.855.000.000		
				Tersedianya Sarana Pengendalian Ramah Lingkungan (Buah-buahan dan Sayuran)	0 Paket	1	2.500.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2.500.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Komoditas Hortikultura (Bawang Merah, Cabai Besar dan Mangga)	97.300 Ton	98.080	15.000.000	98.472	15.000.000	0	0	0	0	0	0	196.552	30.000.000		
		05.2.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	0 BA	0	0	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0	1	15.000.000		
				Jumlah wilayah yang mendapat fasilitas penanggulangan bencana	0 Ha	0	0	3.615	15.000.000	3.787	0	3.959	0	4.132	0	15.493	15.000.000		
		05.2.01.01.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Klinik Agribisnis Hortikultura	0 Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	2	10.000.000	BIDANG TANAMAN PANGAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Terlaksananya Sekolah Lapangan Good Agricultural Practices (GAP) Dan Good Handling Practice (GHP)	8 Kelompok	4	5.000.000	4	5.000.000	0	0	0	0	0	0	8	10.000.000		
				Terlaksananya SL GAP dan GHP Mangga	5 Kelompok	4	5.000.000	4	5.000.000	0	0	0	0	0	0	8	10.000.000		
		06.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Produksi Komoditas Hortikultura (Bawang Merah, Cabai Besar dan Mangga)	97.300 Ton	98.080	78.500.000	98.472	280.000.000	0	0	0	0	0	0	196.552	358.500.000		
		06.2.01.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 BA	0	0	1	280.000.000	0	0	0	0	0	0	1	280.000.000		
				Jumlah layanan rekomendasi yang difasilitasi	0 Jenis	0	0	5	280.000.000	5	0	5	0	5	0	20	280.000.000		
		06.2.01.02.	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Teregistrasinya Lahan Usaha/Kebun Kelompok	50 Unit	50	68.500.000	52	270.000.000	0	0	0	0	0	0	102	338.500.000	BIDANG HORTIKULTURA	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Pelatihan Registrasi Lahan Usaha/Kebun	1 Kali	1	5.000.000	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	2	10.000.000		
				Festifal Produk Unggulan Pertanian Kabupaten Cirebon	0 Kali	1	5.000.000	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	2	10.000.000		
				Registrasi Lahan Usaha/Kebun Kelompok	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Pelatihan Registrasi Lahan Usaha/Kebun Kelompok	0 Kali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Festival Produk Unggulan Pertanian kabupaten Cirebon	0 Dok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Jumlah Pelatihan Registrasi Lahan Usaha/Kebun	0 Kali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Meningkatnya Produksi Sektor Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura dan Peternakan terhadap PDRB	Laju Produksi Sektor Perkebunan (Gula dan Kelapa)	0,6 Prosen	0,6	652.000.000	0,6	1.623.421.000	0	0	0	0	0	0	1,2	2.275.421.000		
		02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan (Gula dan Kelapa)	21.826 Ton	21.873	652.000.000	21.919	1.623.421.000	0	0	0	0	0	0	43.792	2.275.421.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		02.2.01.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	0 BA	0	0	1	1.199.600.000	0	0	0	0	0	0	1	1.199.600.000		
				Jumlah sarana pertanian (Pupuk, Pestisida, alsintan) yang terawasi peredarannya dan mutu penggunaannya	0 Jenis	0	0	3	1.199.600.000	3	0	3	0	3	0	12	1.199.600.000		
		02.2.01.02.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Timbangan Gantung (Oxford)	0 Unit	2	422.000.000	2	1.194.600.000	0	0	0	0	0	0	4	1.616.600.000	BIDANG PERKEBUNAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Mesin Kletek Tebu	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Penyediaan Mesin Alat Ukur Nira Tebu (Hand Brix)	3 Unit	2	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5.000.000		
				Bimtek Pembuatan Pupuk Organik (Limbah Tebu)	1 Kali	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.000.000		
				Penyediaan Alat Mesin Dampas Tebu	0 Unit	2	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5.000.000		
				Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tebu	0 Dok	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.000.000		
				Penyediaan Bibit Tebu	0 Ha	6	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5.000.000		
				Terlaksananya Kegiatan Monitoring Sosialisasi Pembinaan dan Evaluasi	0 kali	0	0	2	5.000.000	0	0	0	0	0	0	2	5.000.000		
		02.2.02.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	0 BA	0	0	1	423.821.000	0	0	0	0	0	0	1	423.821.000		
				Jumlah ketersediaan Sumber Daya Genetik (SDG) komoditas unggulan hewan/tanaman yang dikelola	0 Jenis	0	0	7	423.821.000	7	0	7	0	7	0	7	423.821.000		
		02.2.02.01.	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Terbangunnya Kebun Bibit Datar Tebu	0 Ha	4	5.000.000	2	213.821.000	0	0	0	0	0	0	6	218.821.000	BIDANG PERKEBUNAN	Wilayah Kab. Cirebon
				Demplot Inovasi Teknologi Budidaya Tebu (GAP)	0 Ha	2	5.000.000	2	5.000.000	0	0	0	0	0	0	4	10.000.000		
				Pengembangan Luas Areal Lada Perdu	0 Ha	0,3	5.000.000	0,15	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0,45	10.000.000		
				Pengembangan Luas Tanaman Kelapa	0 Ha	5	190.000.000	5	200.000.000	0	0	0	0	0	0	10	390.000.000		
		03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan (Gula dan Kelapa)	21.826 Ton	21.873		21.919		0		0		0		43.792			
			Meningkatnya Produksi Sektor Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura dan Peternakan terhadap PDRB	Laju Produksi Sektor Peternakan (Sapi Potong, Ayam Ras, Unggas Lokal dan Domba)	1 Prosen	1,7	2.466.000.000	1,7	20.303.541.700	0	0	0	0	0	0	3,4	22.769.541.700		
		02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Laju Peningkatan Angka Kebuntingan Ternak	0,5 %	0,5		0,5		0		0		0		1			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Produksi Sektor Peternakan (Sapi Potong, Ayam Ras, Unggas Lokal dan Domba)	29.106 Ton	29.996	1.411.800.000	30.508	640.041.700	0	0	0	0	0	0	30.508	2.051.841.700		
				Jumlah Populasi Ternak	4.859.198 Ekor	4.992.558		5.078.835		0	0	0	0	0	0	5.078.835			
		02.2.02.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	0 BA	0	0	1	635.041.700	0	0	0	0	0	0	1	635.041.700		
				Jumlah ketersediaan Sumber Daya Genetik (SDG) komoditas unggulan hewan/tanaman yang dikelola	0 Jenis	0	0	7	635.041.700	7	0	7	0	7	0	7	635.041.700		
		02.2.02.02.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Penyediaan Semen Beku	1.000 Dosis	1.100	140.947.000	1.000	149.041.700	0	0	0	0	0	0	2.100	289.988.700	BIDANG PETERNAKAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Penyediaan N2 cair	2.100 Liter	2.400	5.000.000	2.100	5.000.000	0	0	0	0	0	0	4.500	10.000.000		
				Penyediaan Sarana Inseminasi Buatan	1 Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	2	10.000.000		
		02.2.02.03.	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Penyediaan Hijauan Pakan Ternak	102.720 Kg	151.920	425.853.000	175.200	451.000.000	0	0	0	0	0	0	327.120	876.853.000	BIDANG PETERNAKAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Penyediaan Pakan Konsentrat	10.272 Kg	15.192	5.000.000	17.520	5.000.000	0	0	0	0	0	0	32.712	10.000.000		
				Penyediaan Obatobatan Ternak	1 Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	2	10.000.000		
				Penyediaan Peralatan Kandang	0 Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	2	10.000.000		
				Penyediaan pakan unggas	6.876 Kg	14.592	5.000.000	10.176	5.000.000	0	0	0	0	0	0	24.768	10.000.000		
				Tersedianya Pakan Aneka Ternak	5.640 Kg	2.916	5.000.000	1.800	5.000.000	0	0	0	0	0	0	4.716	10.000.000		
				Pembibitan Unggas	0 ekor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Pembibitan Itik Rambon (Mesin Tetes Kapasitas 100 butir)	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		02.2.06.	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	0 BA	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	1	5.000.000		
				Jumlah bibit ternak yang difasilitasi penyediaannya	0 Jenis	0	0	1	5.000.000	3	0	3	0	1	0	8	5.000.000		
		02.2.06.01.	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Peningkatan Populasi Ternak Sapi di Kelompok	1 Kelompok	2	805.000.000	2	0	0	0	0	0	0	4	805.000.000	BIDANG PETERNAKAN	Wilayah Kab. Cirebon	
				Peningkatan Populasi Ternak Domba di Kelompok	2 Kelompok	4	5.000.000	8	5.000.000	0	0	0	0	0	12	10.000.000			
		03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Sektor Peternakan (Sapi Potong, Ayam Ras, Unggas Lokal dan Domba)	29.106 Ton	29.996	634.200.000	30.508	19.205.000.000	0	0	0	0	0	0	30.508	19.839.200.000		
		03.2.02.	Pembangunan Prasarana Pertanian	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	0 BA	0	0	1	19.205.000.000	0	0	0	0	0	0	1	19.205.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun/direhab	0 Unit	0	0	4	19.205.000.000	339	0	359	0	415	0	1.117	19.205.000.000		
		03.2.02.07.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Layanan Pematongan Hewan Unggas	130.000 Ekor	140.000	629.200.000	140.000	19.200.000.000	0	0	0	0	0	0	280.000	19.829.200.000	BIDANG KESEHATAN HEWAN	Rumah Potong Hewan Ruminansia (Desa Batambat - Kecamatan tengah tani); Rumah Potong Hewan Unggas (Desa Prajawinangun kulon - Kecamatan kaliwedi)
				Jumlah Layanan Pematongan Hewan Ruminansia	9.125 Ekor	9.125	5.000.000	9.125	5.000.000	0	0	0	0	0	0	18.250	10.000.000		
		03.2.02.09.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak di UPTD Pengembangan Bibit Peternakan; Kandang Sapi	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG PETERNAKAN	Wilayah Kab. Cirebon
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak di UPTD Pengembangan Bibit Peternakan; Kandang Sapi	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
		04.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Presentase Penurunan Frekuensi Kemunculan Penyakit Zoonosis	2 Prosen	2	420.000.000	2	458.500.000	0	0	0	0	0	2	878.500.000			
		04.2.01.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 BA	0	0	1	230.000.000	0	0	0	0	0	1	230.000.000			
				Jumlah Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan	0 Jenis	0	0	3	230.000.000	3	0	3	0	3	0	12	230.000.000		
		04.2.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan (Pengobatan Hewan Kecil)	5.500 ekor	4.900	205.000.000	4.998	210.000.000	0	0	0	0	0	9.898	415.000.000	BIDANG KESEHATAN HEWAN	Wilayah Kabupaten Cirebon	
				Jumlah Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan (Pengobatan Hewan Besar)	440 Ekor	390	5.000.000	398	5.000.000	0	0	0	0	0	788	10.000.000			
				Jumlah Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan (Pengobatan Unggas)	0 Ekor	4.000	5.000.000	4.080	5.000.000	0	0	0	0	0	8.080	10.000.000			
				Jumlah Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan (Vaksinasi Rabies)	2.000 Ekor	550	5.000.000	561	5.000.000	0	0	0	0	0	1.111	10.000.000			
				Jumlah Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan (Vaksinasi AI/ND)	75.000 ekor	25.000	5.000.000	25.500	5.000.000	0	0	0	0	0	50.500	10.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		04.2.04.	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	0 BA	0	0	1	228.500.000	0	0	0	0	0	0	1	228.500.000		
				Jumlah cakupan pengawasan persyaratan teknis kesmavet	0 Jenis	0	0	2	228.500.000	2	0	2	0	2	0	8	228.500.000		
		04.2.04.02.	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pemeriksaan AM PM Hewan Qurban	0 Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Jumlah Ternak dan BAH yang diawasi dalam perdagangan (Bahan Asal Hewan)	1.000 Sampel	430	180.000.000	300	213.500.000	0	0	0	0	0	0	730	393.500.000	BIDANG KESEHATAN HEWAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Jumlah Ternak dan BAH yang diawasi dalam perdagangan (Ternak Besar)	12.625 Ekor	12.025	5.000.000	12.125	5.000.000	0	0	0	0	0	0	24.150	10.000.000		
				Jumlah Ternak dan BAH yang diawasi dalam perdagangan (Ternak Kecil)	40.000 Ekor	40.100	5.000.000	40.200	5.000.000	0	0	0	0	0	0	80.300	10.000.000		
				Jumlah Ternak dan BAH yang diawasi dalam perdagangan (Unggas)	417.700 Ekor	432.900	5.000.000	434.200	5.000.000	0	0	0	0	0	0	867.100	10.000.000		
		07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Laju Peningkatan Angka Kebuntingan Ternak	0,5 %	0,5		0,5		0		0		0		1			
	Meningkatnya Produksi Sektor Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura dan Peternakan terhadap PDRB			Jumlah Produksi Komoditas Unggulan (Beras)	0 Ton	0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Produksi Komoditas Unggulan (Gula)	0 Ton	0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Produksi Komoditas Unggulan (Bawang Merah)	0 Ton	0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Produksi Komoditas Unggulan (Cabai Besar)	0 Ton	0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Produksi Komoditas Unggulan (Mangga)	0 Ton	0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Produksi Komoditas Unggulan (Domba)	0 Ton	0		0		0		0		0		0			
				Jumlah Produksi Komoditas Unggulan (Unggas Lokal)	0 Ton	0		0		0		0		0		0			
				Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya	0 Ton/Ha	0		0		0		0		0		0			
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani			Presentase Kelas Kelompok Petani Utama dan Madya	4,42 Prosen	4,59	5.698.215.192	4,75	6.487.702.240	0	0	0	0	0	0	4,75	12.185.917.432		
		07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase Penyuluh Yang Lulus Pelatihan Berbasis Kompetensi	20 %	20	5.698.215.192	20	6.487.702.240	0	0	0	0	0	0	40	12.185.917.432		
		07.2.01.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	0 BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Jumlah Kelompok Tani yang Naik kelas	0 Kelompok Tani	0	0	160	6.487.702.240	157	0	154	0	151	0	622	6.487.702.240		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		07.2.01.01.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Pelatihan Teknis Penyuluh Lapangan	249 Orang	249	2.885.357.596	248	5.672.402.240	0	0	0	0	0	0	497	8.557.759.836	BIDANG PENYULUHAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
		07.2.01.03.	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Fasilitasi POSLUHDES	5 Unit	5	2.812.857.596	5	815.300.000	0	0	0	0	0	0	10	3.628.157.596	BIDANG PENYULUHAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD	0 Poin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Uji Coba Paket Teknologi TTP Sedong	0 Lokasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Meningkatnya Kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD	75,86 Poin	77	53.841.140.700	80	63.233.566.306	0	0	0	0	0	0	80	117.074.707.006		
		01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100		100		0	0	0	0	0	100				
				Prosentase Pemenuhan Disiplin Aparatur	100 %	100	50.771.530.000	100	59.454.009.000	0	0	0	0	0	100	110.225.539.000			
				Prosentase Pemenuhan Capaian Kinerja	100 Prosen	100		100		0	0	0	0	0	100				
				Penjabaran Konsistensi Kegiatan RENSTRA Ke dalam Renja	100 Dokumen	100	93.488.800	100	440.963.510	0	0	0	0	0	100	534.452.310			
				Prosentase Pemenuhan Sarana prasarana Aparatur Yang Sesuai Standar Kebutuhan Pelayanan Prima	100 Prosen	100	2.966.816.000	100	3.328.057.306	0	0	0	0	0	100	6.294.873.306			
				Prosentase Pemenuhan Capaian Realisasi Keuangan	100 Prosen	100	9.305.900	100	10.536.490	0	0	0	0	0	100	19.842.390			
		01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 BA	0	0	1	440.963.510	0	0	0	0	0	1	440.963.510			
				Jumlah kesesuaian program dalam Renstra dan Renja	0 Jenis	0	0	7	440.963.510	7	0	7	0	7	0	7	440.963.510		
		01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusun Dokumen Perencanaan Sektoral (RENJA MURNI)	1 Dokumen	1	38.000.000	1	420.000.000	0	0	0	0	0	2	458.000.000	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon	
				Tersusun Dokumen Perencanaan Sektoral (RENJA PERUBAHAN)	1 Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	0	0	0	0	0	2	10.000.000			
				Tersusun Dokumen Perencanaan Sektoral (RENSTRA)	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Capaian Kinerja & Ikhtisar Kinerja SKPD (LAPTAH)	1 Dokumen	1	5.694.100	1	5.963.510	0	0	0	0	0	2	11.657.610	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon	
				Tersusunnya Dokumen Capaian Kinerja & Ikhtisar Kinerja SKPD (LKP) dan LPPD)	1 Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	0	0	0	0	0	2	10.000.000			
				Tersusunnya Dokumen Capaian Kinerja & Ikhtisar Kinerja SKPD (LAKIP)	1 Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	0	0	0	0	0	2	10.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Kinerja perangkat daerah	1 Dok	1	34.794.700	0	0	0	0	0	0	0	0	1	34.794.700	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
		01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 BA	0	0	1	59.464.545.490	0	0	0	0	0	0	1	59.464.545.490		
				Jumlah belanja urusan daerah yang difasilitasi anggarannya	0 jenis	0	0	2	59.464.545.490	2	0	2	0	2	0	2	59.464.545.490		
		01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	0 Pegawai	142	50.771.530.000	283	59.454.009.000	0	0	0	0	0	0	283	110.225.539.000	DINAS PERTANIAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
		01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Buku laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1	3.777.000	1	4.454.700	0	0	0	0	0	0	2	8.231.700	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
		01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Buku laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	1	5.528.900	1	6.081.790	0	0	0	0	0	0	2	11.610.690	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
		01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 BA	0	0	1	488.200.000	0	0	0	0	0	0	1	488.200.000		
				Jumlah pendukung pelayanan administrasi perkantoran yang difasilitasi	0 Jenis	0	0	0	0	7	0	7	0	7	0	7	0		
		01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	peralatan listrik	5 Jenis	5	6.419.000	5	7.060.000	0	0	0	0	0	0	10	13.479.000	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
		01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan, perlengkapan kantor dan rumah dinas	30 Jenis	5	100.000.000	4	111.495.000	0	0	0	0	0	0	9	211.495.000	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
		01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kebutuhan Jamuan Makanan dan Minuman Rapat yang difasilitasi	11 Kali	11	96.950.000	11	106.645.000	0	0	0	0	0	0	22	203.595.000	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Tersedianya Kebutuhan Jamuan Makanan dan Minuman Tamu yang difasilitasi	11 Bulan	11	5.000.000	11	5.000.000	0	0	0	0	0	0	22	10.000.000		
		01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan (karcis, STS, kartu kendali, kartu disposisi, amplop dinas/bupati/setda, map dinas, spanduk)	10 Jenis	10	45.000.000	10	48.000.000	0	0	0	0	0	0	20	93.000.000	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
		01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar Koran Nasional	4 Jenis	4	25.000.000	4	27.500.000	0	0	0	0	0	0	8	52.500.000	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Tersedianya surat kabar Koran Regional	4 Jenis	4	5.000.000	4	5.000.000	0	0	0	0	0	0	8	10.000.000		
				Tersedianya surat kabar Koran Lokal	4 Jenis	4	5.000.000	4	5.000.000	0	0	0	0	0	0	8	10.000.000		
				Tersedianya Majalah pertanian	1 Buku	1	5.000.000	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	2	10.000.000		
		01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya ATK dalam 1 tahun	31 Jenis	31	73.153.200	31	80.000.000	0	0	0	0	0	0	62	153.153.200	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan ke dalam daerah	12 Bulan	12	75.477.800	12	82.500.000	0	0	0	0	0	0	24	157.977.800	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Perjalanan Luar Daerah	12 Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	0	0	0	0	0	0	24	10.000.000		
		01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 BA	0	0	1	404.059.706	0	0	0	0	0	0	1	404.059.706		
				Jumlah Prasarana Aparatur yang dibutuhkan sesuai Standar dalam Pelayanan	0 Jenis	0	0	4	404.059.706	4	0	4	0	4	0	4	404.059.706		
		01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening telpon yang harus dibayar selama 1 tahun	12 Bulan	12	280.000.000	12	389.059.706	0	0	0	0	0	0	24	669.059.706	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				PDAM (Rekening Air) yang harus dibayar selama 1 tahun	12 Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	0	0	0	0	0	0	24	10.000.000		
				Rekening Listrik yang harus dibayar dalam 1 tahun	12 Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	0	0	0	0	0	0	24	10.000.000		
				Internet yang harus dibayar 1 tahun	12 Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	0	0	0	0	0	0	24	10.000.000		
		01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 BA	0	0	1	2.435.797.600	0	0	0	0	0	0	1	2.435.797.600		
				Jumlah pemeliharaan BMD sesuai Standar dalam Pelayanan	0 Jenis	0	0	1	2.435.797.600	1	0	1	0	1	0	4	2.435.797.600		
		01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Roda 2	0 Unit	248	600.000.000	248	750.000.000	0	0	0	0	0	0	248	1.350.000.000	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Roda Tiga	1 Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	2	10.000.000		
				Roda 4	8 Unit	8	5.000.000	8	5.000.000	0	0	0	0	0	0	16	10.000.000		
		01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terealisasinya pembayaran pajak (STNK) kendaraan dinas dalam 1 tahun	280 Unit	280	40.000.000	190	45.000.000	0	0	0	0	0	0	190	85.000.000	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
		01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan kerja yang diperbaiki	7 Jenis	7	49.292.000	7	54.221.200	0	0	0	0	0	0	7	103.513.200	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
		01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bangunan gedung kantor yang terpelihara (Gedung UPT)	28 Unit	28	1.500.000.000	28	1.550.000.000	0	0	0	0	0	0	56	3.050.000.000	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon (Dinas Pertanian, UPTD dan BPP)
				bangunan gedung kantor yang terpelihara (Gedung BPP)	16 Unit	16	5.000.000	16	5.000.000	0	0	0	0	0	0	32	10.000.000		
				bangunan gedung kantor yang terpelihara (Gedung TTP Sedong)	1 Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	2	10.000.000		
				bangunan gedung kantor yang terpelihara (Gedung Dinas)	1 Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	2	10.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase pemeliharaan bangunan milik SKPD sesuai standar	2 Unit	2	10.524.000	2	11.576.400	0	0	0	0	0	0	2	22.100.400	SEKRETARIAT DISTAN	Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)
Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB				Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	-1,05 Persen	1,76	733.000.000	1,86	69.711.973.818	2,08	207.981.869.528	2,31	247.842.500.001	2,54	223.220.334.763	2,54	749.489.678.110		
			Meningkatnya Produksi Sektor Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura dan Peternakan terhadap PDRB	Jumlah produksi komoditas sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	0 Ton	0		0		0		0		0		0			
			Meningkatnya Produksi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura dan Peternakan)	Jumlah produksi komoditas sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan	465.141 Ton	468.478	733.000.000	506.686	69.711.973.818	517.162	207.981.869.528	548.414	247.842.500.001	588.778	223.220.334.763	2.629.518	749.489.678.110		
		01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD	0 Poin	0	0	82,9	59.865.920.200	83	67.172.403.919	84	70.425.821.689	85	74.346.352.692	85	271.810.498.500		
		01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 BA	0	0	1	194.690.000	0	0	0	0	0	0	1	194.690.000		
				Jumlah kesesuaian program dalam Renstra dan Renja	0 Jenis	0	0	7	194.690.000	7	855.000.000	7	975.000.000	7	1.095.000.000	7	3.119.690.000		
		01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	0 dok	0	0	2	92.690.000	1	500.000.000	0	0	0	0	3	592.690.000	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Jumlah Dokumen Statistik Pertanian	0 dok	0	0	12	67.000.000	12	65.000.000	0	0	0	0	12	132.000.000		
				Jumlah Aplikasi Pendukung Perencanaan yang dikelola	0 Aplikasi	0	0	2	5.000.000	2	50.000.000	0	0	0	0	2	55.000.000		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	4	680.000.000	5	745.000.000	9	1.425.000.000		
		01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	0 Dok	0	0	1	5.000.000	1	70.000.000	0	0	0	0	2	75.000.000	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dok	0	0	0	0	0	0	2	80.000.000	2	90.000.000	4	170.000.000		
		01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dok	0	0	1	5.000.000	1	30.000.000	0	0	0	0	2	35.000.000	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	4	40.000.000	4	50.000.000	8	90.000.000		
		01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	0 Dok	0	0	1	5.000.000	1	25.000.000	0	0	0	0	2	30.000.000	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	2	35.000.000	2	45.000.000	4	80.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA-Perubahan SKPD	0 Dok	0	0	1	5.000.000	1	20.000.000	0	0	0	2	25.000.000	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon	
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	4	30.000.000	4	40.000.000	8	70.000.000		
		01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja perangkat daerah	0 Dok	0	0	4	5.000.000	4	20.000.000	0	0	0	8	25.000.000	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	5	25.000.000	5	30.000.000	10	55.000.000		
		01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	0 Dok	0	0	12	5.000.000	12	75.000.000	0	0	0	24	80.000.000	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	12	85.000.000	12	95.000.000	24	180.000.000		
		01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 BA	0	0	1	59.464.009.000	0	0	0	0	0	1	59.464.009.000			
				Jumlah belanja urusan daerah yang difasilitasi anggarannya	0 jenis	0	0	2	59.464.009.000	2	62.456.931.919	2	65.579.308.439	2	68.857.855.836	2	256.358.105.194		
		01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan.	0 Pegawai	0	0	283	59.454.009.000	290	62.426.709.450	0	0	0	290	121.880.718.450	DINAS PERTANIAN	Wilayah Kabupaten Cirebon	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	0	0	0	0	0	0	295	65.548.044.923	300	68.825.447.169	300	134.373.492.092		
		01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	0 Dok	0	0	0	5.000.000	1	5.070.500	0	0	0	1	10.070.500	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	1	5.577.550	1	6.135.305	2	11.712.855		
		01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran	0 Dok	0	0	1	5.000.000	2	25.151.969	0	0	0	3	30.151.969	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	3	25.685.966	3	26.273.362	6	51.959.328		
		01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah aset milik daerah yang dikelola (KIB)	0 Jenis	0	0	6	5.000.000	6	74.812.000	6	79.812.000	6	89.812.000	6	249.436.000		
		01.2.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Aset SKPD	0 Dok	0	0	3	5.000.000	12	74.812.000	0	0	0	15	79.812.000	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	12	79.812.000	12	89.812.000	24	169.624.000		
		01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 BA	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	1	5.000.000		
				Jumlah penunjang disiplin aparatur yang difasilitasi	0 Jenis	0	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000		
		01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas pegawai beserta Perlengkapannya	200 Stel	0	0	200	5.000.000	200	100.000.000	0	0	0	0	400	105.000.000	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	0	0	0	0	0	200	100.000.000	200	100.000.000	400	200.000.000		
		01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 BA	0	0	1	78.000.000	0	0	0	0	0	0	1	78.000.000		
				Jumlah pendukung pelayanan administrasi perkantoran yang difasilitasi	0 Jenis	0	0	0	0	7	524.196.700	7	599.362.000	7	659.298.200	7	1.782.856.900		
		01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik	0 Jenis	0	0	5	5.000.000	5	7.766.000	0	0	0	0	10	12.766.000	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	0	0	0	0	0	5	8.542.600	5	9.396.860	10	17.939.460		
		01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan, perlengkapan kantor, dan rumah dinas	0 Jenis	0	0	4	5.000.000	7	130.155.900	0	0	0	0	11	135.155.900	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	0	0	0	0	0	8	170.000.000	9	187.000.000	17	357.000.000		
		01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan jamuan makanan dan minuman rapat/tamu yang difasilitasi	0 Bulan	0	0	11	5.000.000	11	122.309.500	0	0	0	0	22	127.309.500	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Jumlah Kebutuhan Jamuan Makanan dan Minuman Tamu yang difasilitasi	0 Bulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	0	0	0	0	0	11	132.824.400	11	146.106.840	22	278.931.240		
		01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan (karcis, STS, kartu kendali, kartu disposisi, amplop dinas/bupati/setda, map dinas, spanduk)	0 Jenis	0	0	10	48.000.000	10	54.450.000	0	0	0	0	20	102.450.000	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0	0	0	0	0	0	10	59.895.000	10	65.884.500	20	125.779.500		
		01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/majalah yang menjadi bahan bacaan	0 Jenis	0	0	4	5.000.000	4	30.250.000	0	0	0	0	8	35.250.000	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Jumlah surat kabar koran regional	0 jenis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Jumlah surat kabar koran lokal	0 jenis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah majalah pertanian	0 Buku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	4	33.275.000	4	36.602.500	8	69.877.500		
		01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK dalam 1 tahun	0 Jenis	0	0	31	5.000.000	31	88.515.300	0	0	0	0	62	93.515.300	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0	0	0	0	0	0	31	95.000.000	31	104.500.000	62	199.500.000		
		01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan ke dalam dan luar daerah	0 Bulan	0	0	12	5.000.000	12	90.750.000	0	0	0	0	24	95.750.000	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Jumlah perjalanan luar daerah	0 Bulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	12	99.825.000	12	109.807.500	24	209.632.500		
		01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 BA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
				Jumlah sarana Aparatur yang dibutuhkan sesuai Standar dalam Pelayanan	0 Jenis	0	0	0	0	1	0	1	0	1	350.000.000	3	350.000.000		
		01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	1	350.000.000	1	350.000.000		
		01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 BA	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	1	50.000.000			
				Jumlah Prasarana Aparatur yang dibutuhkan sesuai Standar dalam Pelayanan	0 Jenis	0	0	4	50.000.000	4	320.223.300	4	330.000.000	4	363.000.000	4	1.063.223.300		
		01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya rekening Telpon, air, listrik dan internet yang difasilitasi	0 Bulan	0	0	3	50.000.000	12	320.223.300	0	0	0	0	15	370.223.300	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Rekening Air (PDAM)	0 Bulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Rekening Listrik	0 Bulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Rekening Internet	0 Bulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	12	330.000.000	12	363.000.000	24	693.000.000		
		01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 BA	0	0	1	69.221.200	0	0	0	0	0	1	69.221.200			
				Jumlah pemeliharaan BMD sesuai Standar dalam Pelayanan	0 Jenis	0	0	1	69.221.200	1	2.841.240.000	1	2.762.339.250	1	2.831.386.656	4	8.504.187.106		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan bermotor yang difasilitasi pemeliharannya	0 Unit	0	0	248	5.000.000	248	897.324.490	0	0	0	0	248	902.324.490	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Jumlah roda tiga	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Jumlah roda 4	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0	0	0	0	0	248	899.000.000	248	923.900.000	496	1.822.900.000			
		01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pajak (STNK) kendaraan dinas	0 Unit	0	0	248	0	248	58.240.000	0	0	0	248	58.240.000	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0	0	0	0	0	248	64.064.000	248	70.470.400	496	134.534.400			
		01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	0 Jenis	0	0	7	54.221.200	7	59.643.300	0	0	0	14	113.864.500	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	0	0	0	0	7	65.607.600	7	72.168.360	14	137.775.960			
		01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara (Gedung UPT, Gedung BPP, Gedung TTP Sedong, dan Gedung Dinas)	0 Unit	0	0	23	5.000.000	23	1.813.000.000	0	0	0	23	1.818.000.000	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon (Dinas Pertanian, UPTD dan BPP)	
				Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara (Gedung BPP)	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara (Gedung TTP Sedong)	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara (Gedung Dinas)	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	0	0	0	0	23	1.715.000.000	23	1.744.313.481	46	3.459.313.481			
		01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan rumah dinas yang difasilitasi pemeliharannya	0 Unit	0	0	2	5.000.000	2	13.032.210	0	0	0	2	18.032.210	SEKRETARIAT DISTAN	Kab. Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	0	0	0	0	2	18.667.650	2	20.534.415	2	39.202.065			
		02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rasio Ketersediaan Sarana Produksi Pertanian	0 -	0	0	0,51	1.749.836.200	0,54	40.228.958.255	0,56	58.880.874.980	0,58	34.246.488.530	0,58	135.106.157.965		
		02.2.01.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	0 BA	0	0	1	720.000.000	0	0	0	0	0	1	720.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah sarana pertanian (Pupuk, Pestisida, alsintan) yang terawasi peredarannya dan mutu penggunaannya	0 Jenis	0	0	3	720.000.000	3	699.321.000	3	794.760.000	3	947.050.000	12	3.161.131.000		
	02.2.01.01.		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah benih padi yang terawasi mutu dan peredarannya	0 ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Jumlah bibit tebu yang terawasi mutu dan peredarannya	0 ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Jumlah tanaman mangga yang terawasi mutu dan peredarannya	0 Pohon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Jumlah benih cabai besar yang terawasi mutu dan peredarannya	0 Kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Jumlah benih bawang merah yang terawasi mutu dan peredarannya	0 ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Jumlah bibit domba yang terawasi jenis dan peredarannya	0 Ekor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Jumlah bibit unggas lokal yang terawasi jenis dan peredarannya	0 Ekor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Jumlah alokasi pupuk yang terawasi perolehan dan pemanfaatannya	0 ton	0	0	72.083	40.000.000	80.183	84.800.000	0	0	0	0	80.183	124.800.000		
				Jumlah sarana pertanian (Pestisida) yang terawasi mutu dan peredarannya	0 dok	0	0	1	10.000.000	1	42.400.000	0	0	0	0	2	52.400.000		
				Jumlah kelompok Tani Yang Terawasi Penggunaan Alat Mesin Pertanian	0 Kelompok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Jumlah petani yang tervalidasi kebutuhan dan penggunaan pupuknya	0 orang	0	0	0	0	74.747	67.121.000	0	0	0	0	74.747	67.121.000		
				Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	0 Laporan	0	0	0	0	0	12	239.760.000	12	292.050.000	24	531.810.000			
	02.2.01.02.		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapat fasilitasi sarana pertanian	0 Kelompok	0	0	17	670.000.000	10	500.000.000	0	0	0	27	1.170.000.000	BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	Wilayah Kabupaten Cirebon	
				Jumlah gabungan kelompok petani yang mendapat pendampingan menjadi Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA)	0 Gapoktan	0	0	0	0	50	5.000.000	0	0	0	50	5.000.000			
				Jumlah petani yang tervalidasi kebutuhan pupuk, benih, dan obat	0 Petani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	0 Laporan	0	0	0	0	0	1	555.000.000	1	655.000.000	2	1.210.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah petani yang tervalidasi kebutuhan pupuk, benih, dan obat	0 Petani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG PERKEBUNAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
		02.2.02.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	0 BA	0	0	1	273.144.800	0	0	0	0	0	0	1	273.144.800		
				Jumlah ketersediaan Sumber Daya Genetik (SDG) komoditas unggulan hewan/tanaman yang dikelola	0 Jenis	0	0	7	273.144.800	7	38.043.951.775	7	56.420.861.500	7	31.589.205.050	7	126.327.163.125		
		02.2.02.01.	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah plasma nutfah ternak yang dilestarikan	0 Jenis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	0 VUB	0	0	0	0	0	0	1	400.000.000	1	450.000.000	2	850.000.000		
		02.2.02.02.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bibit tanaman/buah-buahan, dan toga yang difasilitasi untuk masyarakat	0 Batang	0	0	554	52.000.000	1.920	299.060.000	0	0	0	0	2.474	351.060.000	BIDANG HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Jumlah lahan dataran tinggi (up land) yang difasilitasi sumber daya genetik tanamannya	0 Ha	0	0	0	0	1.000	25.800.000.000	0	0	0	0	1.000	25.800.000.000		
				Jumlah peraturan daerah/fasilitasi lainnya terkait peningkatan kualitas SDG tanaman	0 dok	0	0	0	151.144.800	1	906.120.000	0	0	0	0	1	1.057.264.800		
				Jumlah Lahan Usaha/Kebun Kelompok yang Diregistrasi	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Jumlah kebun bibit datar tebu yang dibangun	0 Ha	0	0	0	0	6	233.259.200	0	0	0	0	6	233.259.200		
				Jumlah lahan pertanian milik pemda yang dikelola untuk kebun bibit induk tebu	0 Ha	0	0	0	0	6	233.259.200	0	0	0	0	6	233.259.200		
				Jumlah lahan pertanian milik Pemda yang dikelola untuk demplot inovasi teknologi budidaya tebu (GAP)	0 Ha	0	0	0	0	6	350.000.000	0	0	0	0	6	350.000.000		
				Jumlah bimtek budidaya kelapa	0 Kelompok	0	0	0	0	3	40.000.000	0	0	0	0	3	40.000.000		
				Jumlah bimtek budidaya lada perdu	0 Kelompok	0	0	0	0	3	38.302.375	0	0	0	0	3	38.302.375		
				Jumlah penambahan tanaman mangga di lahan pertanian milik Pemda	0 Ha	0	0	0	0	10	175.000.000	0	0	0	0	10	175.000.000		
				Jumlah bibit tebu yang terawasi mutu dan peredarannya	0 ton	0	0	0	0	38.756	26.600.000	0	0	0	0	38.756	26.600.000		
				Jumlah tanaman mangga yang terawasi mutu dan peredarannya	0 pohon	0	0	0	0	967.106	56.000.000	0	0	0	0	967.106	56.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah benih cabe merah besar yang terawasi mutu dan peredarannya	0 Kg	0	0	0	0	210	20.000.000	0	0	0	0	210	20.000.000		
				Jumlah benih bawang merah yang terawasi mutu dan peredarannya	0 ton	0	0	0	0	5.516	16.000.000	0	0	0	0	5.516	16.000.000		
				Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	45.570.565.000	1	20.083.928.500	2	65.654.493.500		
		02.2.02.03.	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah benih padi unggulan dari hasil penangkaran	0 Ton	0	0	0,85	70.000.000	35	123.455.000	0	0	0	0	35,85	193.455.000	BIDANG TANAMAN PANGAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Jumlah lahan pertanian milik pemda yang dikelola untuk penangkaran benih padi unggulan sebagai insentif petani LP2B/Penanganan Dampak Perubahan Iklim	0 Ha	0	0	0	0	249	4.230.872.000	0	0	0	0	249	4.230.872.000		
				Jumlah lahan pertanian milik pemda yang dikelola untuk penanaman kacang hijau sebagai upaya reboisasi stunting	0 Ha	0	0	0	0	221	4.482.000.000	0	0	0	0	221	4.482.000.000		
				Jumlah lahan pertanian milik pemda yang dikelola untuk penyediaan cadangan pangan	0 Ha	0	0	0	0	40	720.000.000	0	0	0	0	40	720.000.000		
				Jumlah benih padi yang terawasi mutu dan peredarannya	0 Ton	0	0	0	0	2.369	294.024.000	0	0	0	0	2.369	294.024.000		
				Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	10.450.296.500	1	11.055.276.550	2	21.505.573.050		
		02.2.03.	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 BA	0	0	1	222.955.300	0	0	0	0	0	0	1	222.955.300		
				Jumlah bibit ternak bermutu yang digulirkan kepada masyarakat	0 Satuan Ternak	0	0	2	222.955.300	12	675.827.480	12	767.075.480	12	717.475.480	38	2.383.333.740		
		02.2.03.01.	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Hijauan Pakan Ternak untuk pengembangan dan pembibitan ternak	0 Kg	0	0	44.160	130.953.600	195.720	255.876.000	0	0	0	0	239.880	386.829.600	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	UPTD Pengembangan Bibit Peternakan (Desa Kubangdeleg - Kecamatan karangwareng); Taman Teknologi Pertanian (TTP) Sedong (Desa Windujaya - Kecamatan sedong)
				Jumlah Pakan Konsentrat sapi untuk pengembangan dan pembibitan ternak	0 Kg	0	0	4.472	55.195.600	19.572	78.288.000	0	0	0	0	24.044	133.483.600		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Obat-obatan Ternak untuk pengembangan dan pembibitan ternak	0 Paket	0	0	0	0	1	7.201.480	0	0	0	0	1	7.201.480		
				Jumlah Peralatan Kandang untuk pengembangan dan pembibitan ternak	0 Paket	0	0	1	5.000.000	1	1.000.000	0	0	0	0	2	6.000.000		
				Jumlah pakan unggas untuk pengembangan dan pembibitan ternak	0 Kg	0	0	0	0	20.076	200.760.000	0	0	0	0	20.076	200.760.000		
				Jumlah Aneka Pakan untuk pengembangan dan pembibitan ternak	0 Kg	0	0	643	3.022.100	2.566	12.830.000	0	0	0	0	3.209	15.852.100		
				Jumlah unggas yang difasilitasi untuk pengembangan dan pembibitan ternak	0 Ekor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Jumlah Alat Penetasan Itik Rambon (Mesin Tetes Kapasitas 100 butir) untuk pengembangan dan pembibitan ternak	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Jumlah biaya pendukung operasional	0 Tahun	0	0	1	28.784.000	1	119.872.000	0	0	0	0	2	148.656.000		
				Jumlah pakan konsentrat unggas untuk pengembangan dan pembibitan ternak	0 Kg	14.592	0	0	20.076	20.076	0	0	0	0	0	54.744	0		
				Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	12	767.075.480	12	717.475.480	24	1.484.550.960		
		02.2.05.	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan IB per kebuntingan	0 SC	0	0	2	55.293.100	2	417.358.000	2	465.678.000	2	540.258.000	2	1.478.587.100		
		02.2.05.01.	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Semen Beku yang Disediakan	0 Dosis	0	0	350	1.740.000	1.500	57.624.000	0	0	0	0	1.850	59.364.000	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Wilayah kabupaten Cirebon
				Jumlah N2 Cair yang Disediakan	0 Liter	0	0	800	5.358.000	2.100	29.610.000	0	0	0	0	2.900	34.968.000		
				Jumlah Sarana IB yang Disediakan	0 Paket	0	0	1	28.168.600	1	12.000.000	0	0	0	0	2	40.168.600		
				Jumlah biaya pendukung operasional	0 Tahun	0	0	1	20.026.500	1	63.424.000	0	0	0	0	2	83.450.500		
				Jumlah obat-obatan penunjang yang disediakan	0 paket	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0		
				Jumlah bibit domba yang terawasi jenis dan peredarannya	0 ekor	0	0	0	0	301.455	169.900.000	0	0	0	0	301.455	169.900.000		
				Jumlah bibit unggas lokal yang terawasi jenis dan peredarannya	0 ekor	0	0	0	0	2.178.963	84.800.000	0	0	0	0	2.178.963	84.800.000		
				Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	0 Ekor	0	0	0	0	0	0	400	465.678.000	400	540.258.000	800	1.005.936.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		02.2.06.	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	0 BA	0	0	1	478.443.000	0	0	0	0	0	0	1	478.443.000		
				Jumlah bibit ternak yang difasilitasi penyediaannya	0 Jenis	0	0	1	478.443.000	3	392.500.000	3	432.500.000	1	452.500.000	8	1.755.943.000		
		02.2.06.01.	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak sapi yang difasilitasi untuk kelompok	0 Ekor	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Wilayah kabupaten Cirebon
				Jumlah ternak domba yang difasilitasi untuk kelompok	0 Ekor	0	0	0	478.443.000	0	220.000.000	0	0	0	0	0	698.443.000		
				Jumlah ternak unggas yang difasilitasi untuk kelompok	0 Ekor	0	0	0	0	0	7.500.000	0	0	0	0	0	7.500.000		
				Jumlah biaya pendukung operasional	0 Tahun	0	0	0	0	1	15.000.000	0	0	0	0	1	15.000.000		
				Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0 Ekor	0	0	0	0	0	0	91	432.500.000	91	452.500.000	182	885.000.000		
		03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rasio Ketersediaan Prasarana Produksi Pertanian	0 -	0	0	0,35	6.346.181.520	0,42	93.019.784.000	0,46	110.894.784.000	0,49	107.004.784.000	0,49	317.265.533.520		
		03.2.01.	Pengembangan Prasarana Pertanian	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	0 BA	0	0	1	55.427.150	0	0	0	0	0	0	1	55.427.150		
				Jumlah Prasarana Pertanian yang Difasilitasi	0 Jenis	0	0	12	55.427.150	12	4.383.624.000	12	4.523.624.000	12	4.623.624.000	12	13.586.299.150		
		03.2.01.01.	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah lahan pertanian yang akan difasilitasi asuransi oleh pemerintah daerah	0 Ha	0	0	0	0	40.000	3.300.000.000	0	0	0	40.000	3.300.000.000	BIDANG TANAMAN PANGAN	Wilayah Kabupaten Cirebon	
				Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	3.310.000.000	1	3.320.000.000	2	6.630.000.000		
		03.2.01.02.	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Jumlah lahan potensial menjadi (LP2B) yang diupdate secara berkala	0 Ha	0	0	0	0	40.000	419.812.000	0	0	0	40.000	419.812.000	BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	Wilayah Kabupaten Cirebon	
				Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	539.812.000	1	619.812.000	2	1.159.624.000		
		03.2.01.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah advokasi permodalan dan pemasaran hasil produksi petani	0 Dokumen	0	0	2	55.427.150	2	463.812.000	0	0	0	4	519.239.150	BIDANG TANAMAN PANGAN	Wilayah Kabupaten Cirebon	
				Jumlah festival produk unggulan pertanian Kabupaten Cirebon	0 Kali	0	0	0	0	1	200.000.000	0	0	0	1	200.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	1	673.812.000	1	683.812.000	2	1.357.624.000		
		03.2.02.	Pembangunan Prasarana Pertanian	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	0 BA	0	0	1	6.290.754.370	0	0	0	0	0	1	6.290.754.370			
				Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun/direhab	0 Unit	0	0	4	6.290.754.370	339	88.636.160.000	359	106.371.160.000	415	102.381.160.000	1.117	303.679.234.370		
		03.2.02.01.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi air tanah dangkal yang dibangun	0 unit	0	0	10	2.685.318.870	10	2.855.000.000	0	0	0	0	20	5.540.318.870	BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Jumlah jaringan irigasi air tanah dalam yang dibangun	0 Unit	0	0	3	940.000.000	6	1.715.000.000	0	0	0	0	9	2.655.000.000		
				Jumlah jaringan irigasi tersier yang direhab/dibangun	0 unit	0	0	0	0	333	34.605.000.000	0	0	0	0	333	34.605.000.000		
				Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	0 Unit	0	0	0	0	0	0	204	39.425.000.000	204	39.640.000.000	408	79.065.000.000		
		03.2.02.02.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah embung yang dibangun	0 unit	0	0	0	0	3	900.000.000	0	0	0	0	3	900.000.000	BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0	0	0	0	0	0	4	1.200.000.000	5	1.500.000.000	9	2.700.000.000		
		03.2.02.03.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah JUT yang dibangun	0 unit	0	0	6	1.178.840.000	91	18.325.000.000	0	0	0	0	97	19.503.840.000	BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Jumlah jalan produksi yang dibangun	0 unit	0	0	1	508.795.500	15	4.500.000.000	0	0	0	0	16	5.008.795.500		
				Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0	0	0	0	0	0	122	26.060.000.000	172	36.070.000.000	294	62.130.000.000		
		03.2.02.04.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah dam/parit yang dibangun	0 unit	0	0	4	524.097.600	8	965.000.000	0	0	0	0	12	1.489.097.600	BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0	0	0	0	0	0	10	1.205.000.000	12	1.445.000.000	22	2.650.000.000		
		03.2.02.05.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah long storage yang dibangun	0 unit	0	0	2	262.282.400	8	965.000.000	0	0	0	0	10	1.227.282.400	BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Jumlah Long Storage yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0	0	0	0	0	0	10	1.205.000.000	12	1.445.000.000	22	2.650.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		03.2.02.07.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH yang Terbangun	0 Unit	0	0	0	0	1	19.000.000.000	0	0	0	0	1	19.000.000.000	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Desa Prajawinangun Kecamatan Kaliwedi (Desa Prajawinangun kulon - Kecamatan kaliwedi); Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani (Desa Battebat - Kecamatan tengah tani); Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber (Kelurahan Kenanga - Kecamatan sumber)
				Jumlah biaya pendukung operasional RPH	0 Tahun	0	0	1	8.000.000	1	382.420.000	0	0	0	0	2	390.420.000		
				Jumlah dokumen Feasibility Study /Studi Kelayakan/FS	0 Dok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Jumlah dokumen Master Plan	0 Dok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Jumlah DED	0 Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Jumlah sarana prasarana RPH yang disediakan	0 unit	0	0	0	0	1	309.300.000	0	0	0	0	1	309.300.000		
				Jumlah dokumen manajemen konstruksi	0 dokumen	0	0	0	0	1	600.000.000	0	0	0	0	1	600.000.000		
				Jumlah RPH yang memiliki sertifikat Halal	0 Unit	0	0	0	0	1	7.500.000	0	0	0	0	1	7.500.000		
				Jumlah UKL UPL	0 Dok	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	1	100.000.000		
				Jumlah biaya pendukung operasional RPU	0 Tahun	0	0	1	1.000.000	1	97.300.000	0	0	0	0	2	98.300.000		
				Jumlah sarana prasarana RPU	0 Paket	0	0	0	0	1	125.000.000	0	0	0	0	1	125.000.000		
				Jumlah RPU yang memiliki sertifikat halal	0 Unit	0	0	0	0	1	7.500.000	0	0	0	0	1	7.500.000		
				Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0	0	0	182.420.000	0	1.029.020.000	3	31.228.040.000	2	19.183.040.000	2	51.622.520.000		
		03.2.02.08.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah BPP di kecamatan yang direnovasi	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0	0	0	0	0	750.000.000	5	1.650.000.000	5	1.800.000.000	10	4.200.000.000	BIDANG PENYULUHAN	Wilayah Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		03.2.02.09.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah kandang ternak yang disediakan di UPTD pengembangan bibit peternakan	0 unit	0	0	0	0	1	300.000.000	0	0	0	1	300.000.000	BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	Taman Teknologi Pertanian (TTP) Sedong (Desa Windujaya - Kecamatan sedong)	
				Jumlah prasarana pertanian terintegrasi yang dibangun	0 Unit	0	0	0	0	3	600.000.000	0	0	0	3	600.000.000			
				Jumlah kajian dampak pencemaran lingkungan terhadap pertanian	0 Jenis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Jumlah Lahan TTP Sedong	0 Ha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dikelola untuk Taman Teknologi Pertanian (TTP)	0 Unit	0	0	0	0	1	498.120.000	0	0	0	1	498.120.000			
				Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0	0	0	0	0	0	1	4.398.120.000	1	1.298.120.000	2	5.696.240.000		
		04.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penurunan kejadian kasus penyakit hewan menular (zoonosis)	0 Satuan Ternak	0	0	6	128.235.898	6	1.563.031.354	6	1.733.527.332	6	2.845.217.541	6	6.270.012.125		
		04.2.01.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 BA	0	0	1	67.067.128	0	0	0	0	0	1	67.067.128			
				Jumlah Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan	0 Jenis	0	0	3	67.067.128	3	369.611.354	3	440.822.332	3	525.417.541	12	1.402.918.355		
		04.2.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah pengobatan hewan kecil	0 ekor	0	0	0	0	5.098	32.480.000	0	0	0	5.098	32.480.000	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Wilayah Kabupaten Cirebon	
				Jumlah pengobatan hewan besar	0 ekor	0	0	0	0	406	32.480.000	0	0	0	406	32.480.000			
				Jumlah pengobatan unggas	0 ekor	0	0	0	0	4.162	8.324.000	0	0	0	4.162	8.324.000			
				Jumlah vaksinasi rabies	0 ekor	0	0	0	0	572	28.375.776	0	0	0	572	28.375.776			
				Jumlah vaksinasi AI/ND	0 ekor	0	0	0	0	26.010	33.474.870	0	0	0	26.010	33.474.870			
				Jumlah Pengujian Sampel	0 Ekor	0	0	0	0	758	26.545.806	0	0	0	758	26.545.806			
				Jumlah Biaya Operasional pelayanan keswan	0 Tahun	0	0	1	67.067.128	1	207.930.902	0	0	0	2	274.998.030			
				Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	12	440.822.332	12	525.417.541	24	966.239.873		
		04.2.03.	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPTD. Puskesmas yang memberikan pelayanan medik veteriner	0 Unit	0	0	0	0	2	150.000.000	3	180.000.000	3	210.000.000	8	540.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		04.2.03.02.	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	0 Laporan	0	0	0	0	12	150.000.000	12	180.000.000	12	210.000.000	36	540.000.000	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
		04.2.04.	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	0 BA	0	0	1	61.168.770	0	0	0	0	0	0	1	61.168.770		
				Jumlah cakupan pengawasan persyaratan teknis kesmavet	0 Jenis	0	0	2	61.168.770	2	1.043.420.000	2	1.112.705.000	2	2.109.800.000	8	4.327.093.770		
		04.2.04.01.	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah cakupan pendampingan unit usaha	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Jumlah pendampingan kepada kelompok peternak	0 Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Jumlah pendampingan usaha peternak muda	0 Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Jumlah pendampingan akses pembiayaan KUR	0 kelompok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Jumlah pendampingan program kemitraan (PK) BUMN	0 Kelompok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Jumlah pendampingan asuransi ternak sapi/kerbau	0 Kelompok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Jumlah pelatihan usaha pengolahan hasil ternak	0 Unit	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000		
				Jumlah pendampingan akses pemasaran	0 unit	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000		
				Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	12	167.200.000	12	1.016.400.000	24	1.183.600.000		
		04.2.04.02.	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan kesehatan hewan qurban	0 kecamatan	0	0	0	0	40	30.000.000	0	0	0	0	40	30.000.000	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Jumlah pengawasan perdagangan hewan dan BAH	0 pasar hewan	0	0	5	56.168.770	5	20.000.000	0	0	0	10	76.168.770			
				Jumlah pengawasan lalu lintas ternak antar daerah	0 pasar hewan	0	0	0	0	1	270.000.000	0	0	0	1	270.000.000			
				Jumlah Pengambilan dan Pengujian Daging	0 sampel	0	0	130	5.000.000	1.300	90.260.000	0	0	0	1.430	95.260.000			
				Jumlah Pengawasan Produksi Susu/Telur	0 Desa	0	0	0	0	412	271.920.000	0	0	0	412	271.920.000			
				Jumlah sosialisasi Keamanan Pangan terhadap Pedagang Pangan Asal Hewan	0 Orang	0	0	0	0	100	18.000.000	0	0	0	100	18.000.000			
				Jumlah Pengawasan TPU/TPH	0 Unit	0	0	0	0	13	34.320.000	0	0	0	13	34.320.000			
				Jumlah Sosialisasi JULEHA	0 Orang	0	0	0	0	80	67.700.000	0	0	0	80	67.700.000			
				Jumlah Pembinaan Keamanan Pangan Hewani Keluarga	0 Desa	0	0	0	0	83	36.520.000	0	0	0	83	36.520.000			

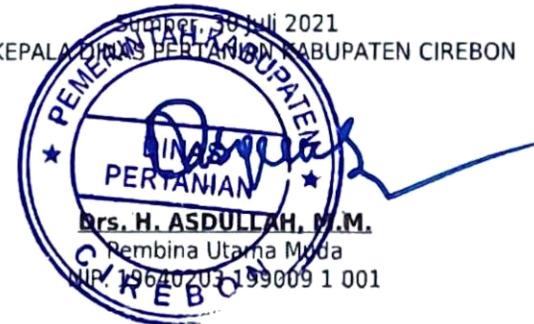
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Sosialisasi Pemeriksaan AM PM Hewan Qurban	0 Desa	0	0	0	0	58	12.960.000	0	0	0	58	12.960.000			
				Jumlah Pengawasan Pemotongan Hewan Qurban	0 kecamatan	0	0	0	0	40	61.740.000	0	0	0	40	61.740.000			
				Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	12	945.505.000	12	1.093.400.000	24	2.038.905.000		
		05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rasio Tingkat Keberhasilan Penanggulangan Bencana Pertanian per-tahun	0 -	0	0	0,52	245.500.000	0,53	1.109.436.000	0,55	759.436.000	0,56	759.436.000	0,56	2.873.808.000		
		05.2.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	0 BA	0	0	1	245.500.000	0	0	0	0	0	1	245.500.000			
				Jumlah wilayah yang mendapat fasilitasi penanggulangan bencana	0 Ha	0	0	3.615	245.500.000	3.787	1.109.436.000	3.959	759.436.000	4.132	759.436.000	15.493	2.873.808.000		
		05.2.01.01.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok tani yang mengikuti sekolah lapang pengendalian OPT dan iklim	0 kelompok	0	0	0	0	40	350.000.000	0	0	0	40	350.000.000	BIDANG TANAMAN PANGAN	Wilayah Kabupaten Cirebon	
				Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	0 Ha	0	0	0	0	0	0	1.936	300.000.000	1.976	300.000.000	3.912	600.000.000		
		05.2.01.02.	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Sekolah Lapangan Good Agricultural Practices (GAP) dan Good Handling Practices (GHP)	0 Kelompok	0	0	5	55.500.000	5	359.436.000	0	0	0	10	414.936.000	BIDANG HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Wilayah Kabupaten Cirebon	
				Jumlah SL GAP dan GHP Buah-buahan	0 Kelompok	0	0	20	90.000.000	5	300.000.000	0	0	0	25	390.000.000			
				Jumlah sarana pengendalian ramah lingkungan (buah-buahan dan sayuran)	0 Paket	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	0	0	0	2	200.000.000			
				Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	0 Ha	0	0	0	0	0	1.481	459.436.000	1.541	459.436.000	3.022	918.872.000			
		06.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Rasio Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian	0 -	0	0	0,8	195.000.000	0,81	579.436.000	0,82	644.236.000	0,83	659.236.000	0,83	2.077.908.000		
		06.2.01.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 BA	0	0	1	195.000.000	0	0	0	0	0	1	195.000.000			
				Jumlah layanan rekomendasi yang difasilitasi	0 Jenis	0	0	5	195.000.000	5	579.436.000	5	644.236.000	5	659.236.000	20	2.077.908.000		
		06.2.01.01.	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Jumlah pelayanan publik yang disusun aturan standar pelayanannya	0 Jenis	0	0	0	0	6	70.000.000	0	0	0	6	70.000.000	SEKRETARIAT DISTAN	Wilayah Kabupaten Cirebon	
				Jumlah pelayanan publik UPTD yang difasilitasi sesuai standar pelayanan	0 unit	0	0	0	0	12	234.436.000	0	0	0	12	234.436.000			
				Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	304.436.000	1	304.436.000	2	608.872.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		06.2.01.02.	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah kelompok yang lahan usaha/kebunnya diregistrasi	0 Unit	0	0	50	195.000.000	54	275.000.000	0	0	0	104	470.000.000	BIDANG HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Wilayah Kabupaten Cirebon	
				Jumlah Festival Produk Unggulan Pertanian Kabupaten Cirebon	0 Kali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	0 Dokumen	0	0	0	0	0	1	285.000.000	1	300.000.000	2	585.000.000			
		06.2.01.03.	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah pengawasan kios saprodi	0 kios	0	0	0	0	0	230	23.000.000	230	23.000.000	460	46.000.000	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Wilayah Kabupaten Cirebon	
				Jumlah SKKH	0 buah	0	0	0	0	0	3.269	14.400.000	3.596	14.400.000	6.865	28.800.000			
				Jumlah SKKBAH	0 Buah	0	0	0	0	0	4.959	14.400.000	5.455	14.400.000	10.414	28.800.000			
				Jumlah pengawasan usaha peternakan	0 Dokumen	0	0	0	0	0	10	3.000.000	10	3.000.000	20	6.000.000			
				Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	0 Laporan	0	0	0	0	0	12	0	12	0	24	0			
		07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase Kelompok Petani Yang Naik Kelas	10 %	10	733.000.000	10	1.181.300.000	10	4.308.820.000	10	4.503.820.000	10	3.358.820.000	10	14.085.760.000		
		07.2.01.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	0 BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Jumlah Kelompok Tani yang Naik kelas	0 Kelompok Tani	0	0	160	1.181.300.000	157	4.308.820.000	154	4.503.820.000	151	3.358.820.000	622	13.352.760.000		
		07.2.01.01.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kaji Terap Tanaman Pertanian/Perkebunan	23 Jenis	32	5.000.000	5	5.000.000	0	0	0	0	0	37	10.000.000	BIDANG PENYULUHAN	Wilayah Kabupaten Cirebon	
				Jumlah penyuluh lapangan yang mengikuti pelatihan teknis	0 Orang	0	0	0	0	263	263.000.000	0	0	0	263	263.000.000			
				Jumlah insentif THL-TBPD	0 OB	0	0	0	0	104	156.000.000	0	0	0	104	156.000.000			
				Jumlah penyusunan program	0 BPP	0	0	0	0	16	56.000.000	0	0	0	16	56.000.000			
				Jumlah penyusunan dan pengesahan program, database, impact point Tk. kabupaten	0 Orang	0	0	0	0	100	25.000.000	0	0	0	100	25.000.000			
				Jumlah Tenaga Teknis	0 Orang	0	0	0	0	1	19.800.000	0	0	0	1	19.800.000			
				Jumlah Temu Teknis Penyuluh/peningkatan kapasitas building	0 Orang	0	0	0	0	259	518.000.000	0	0	0	259	518.000.000			
				Jambore Posluhdes	0 Posluhdes	0	0	0	0	19	28.000.000	0	0	0	19	28.000.000			
				Jumlah pemagangan	0 Orang	0	0	316	5.000.000	40	200.000.000	0	0	0	356	205.000.000			
				Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	0 Unit	0	0	0	0	16	115.000.000	16	1.440.800.000	16	1.515.800.000	48	3.071.600.000		
		07.2.01.02.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Petani Yang Mengikuti Pelatihan Peternakan	22 Kelas	50	673.000.000	3	746.300.000	0	0	0	0	0	53	1.419.300.000	BIDANG PENYULUHAN	Wilayah Kabupaten Cirebon	
				Petani Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peternakan	0 Kelas	14	5.000.000	2	5.000.000	0	0	0	0	0	16	10.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Bimbingan Teknis	0 BPP	0	0	0	0	16	240.000.000	0	0	0	0	16	240.000.000		
				Pembinaan Kelompok Petani Muda/baru (Milenial dan Santri)	0 Kelompok	2	5.000.000	2	5.000.000	0	0	0	0	0	0	4	10.000.000		
				Forum Pelaku, Himpunan, Praktisi dan Pegiat Pertanian	0 Kali	2	5.000.000	2	5.000.000	0	0	0	0	0	0	4	10.000.000		
				Pelayanan Klinik Agribisnis (Jumlah Kunjungan)	80 Orang	80	5.000.000	85	5.000.000	0	0	0	0	0	0	165	10.000.000		
				Pelatihan Petani Pelaku Agribisnis Pertanian	435 Kelas	81	5.000.000	5	5.000.000	0	0	0	0	0	0	86	10.000.000		
				Pelatihan Teknik Kemasan Produk Pertanian	14 Kelas	8	5.000.000	2	5.000.000	0	0	0	0	0	0	10	10.000.000		
				Pelatihan manajemen dan teknis bagi pengurus kelembagaan Pertanian	87 Kelas	24	5.000.000	9	5.000.000	0	0	0	0	0	0	33	10.000.000		
				Jumlah Pameran/Pasar Tani	11 Kali	6	5.000.000	6	5.000.000	6	24.000.000	0	0	0	0	18	34.000.000		
				Terlaksananya pendampingan kegiatan upsus pajale	249 Kelompok	40	5.000.000	40	5.000.000	0	0	0	0	0	0	80	10.000.000		
				Lomba Petani Muda Berprestasi	0 Kali	1	5.000.000	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	2	10.000.000		
				Keikutsertaan Pameran Tk. Provinsi dan Nasional	1 Kali	2	5.000.000	2	5.000.000	0	0	0	0	0	0	4	10.000.000		
				Jumlah Penilaian kelas kelompok	0 KAB	0	0	0	0	1	20.000.000	0	0	0	0	1	20.000.000		
				Jumlah Pertemuan KWT	0 Orang	0	0	0	0	50	60.000.000	0	0	0	0	50	60.000.000		
				Jumlah Pertemuan KTNA	0 Orang	0	0	0	0	30	18.000.000	0	0	0	0	30	18.000.000		
				Jumlah Forum Koordinasi Komisi Penyuluhan	0 Orang	0	0	0	0	50	24.000.000	0	0	0	0	50	24.000.000		
				Jumlah Penyelenggaraan Lomba Petani, Kelompok Tani, Gapoktan/KEP, THL, Penyuluh PNS & Swadaya, Penyuluh Pendamping, Petani Millenial, BPP Berprestasi Tk. Kab, Prov, dan Nasional	0 Kali	0	0	0	0	1	120.000.000	0	0	0	0	1	120.000.000		
				Jumlah PEDANA/PENAS/HKP	0 Kali	0	0	0	0	1	250.000.000	0	0	0	0	1	250.000.000		
				Jumlah Rembug Tani	0 desa	0	0	0	0	424	267.500.000	0	0	0	0	424	267.500.000		
				Jumlah taruna tani yang terbentuk	0 Kelas	0	0	81	5.000.000	60	900.000.000	0	0	0	0	141	905.000.000		
				Pembentukan Taruna Tani	0 Kelas	0	0	81	5.000.000	0	0	0	0	0	0	81	5.000.000		
				Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Unit	0	0	0	0	0	0	300	1.998.500.000	300	1.023.500.000	600	3.022.000.000		
		07.2.01.03.	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelayanan Klinik Agribisnis (Jumlah Kunjungan)	0 Orang	0	0	0	0	90	180.000.000	0	0	0	0	90	180.000.000	BIDANG PENYULUHAN	Wilayah Kabupaten Cirebon
				Jumlah Uji Coba Paket Teknologi (Demplot)	0 Lokasi	0	0	0	0	4	80.000.000	0	0	0	0	4	80.000.000		
				Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap peningkatan IP serta pemanfaatan lahan pemda untuk cadangan pangan	0 Ha	0	0	0	0	249	344.520.000	0	0	0	0	249	344.520.000		
				Jumlah unit pendataan data pertanian	0 BPP	0	0	16	360.000.000	16	400.000.000	0	0	0	0	32	760.000.000		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	0 Unit	0	0	0	0	0	0	16	1.064.520.000	16	819.520.000	32	1.884.040.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2020		2021		2022		2023		2024				Kondisi Akhir	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TOTAL PENDANAAN						70.419.502.892		171.321.927.744		207.981.869.528		247.842.500.001		223.220.334.763		920.786.134.928			

Supper, 20 Juli 2021
 PLT, KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON



Brs. H. ASDULLAH, M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640203-199009 1 001